



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Siliwangi No. 113 Tlp (0231) 206011 - 206015 Fax. (0231) 206604
Email: inspektorat.crb@gmail.com

CIREBON

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Cirebon, 28 Maret 2019
Plt. Inspektur Kota Cirebon



H. GATOT SUBROTO SE, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19620621 198402 1 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon ini disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah Kota Cirebon yaitu: "TERWUJUDNYA KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA YANG RELIGIUS, AMAN, MAJU DAN ASPIRATIF (RAMAH) PADA TAHUN 2018" sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Upaya untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi tersebut tentulah tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras berbagai pihak serta bersama-sama menghadapi rintangan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Cirebon yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan segala harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, Amin.

Cirebon, Maret 2019

WALIKOTA CIREBON,



Drs. H. Washrudin Azis, SH.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
DAFTAR ISI.....	2
Daftar Tabel.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Struktur Organisasi	8
1.5. Isu Strategis	9
1.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	20
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Perencanaan Strategis.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	38
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	45
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	45
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	55
3.3. Evaluasi dan Analisis Anggaran	131
BAB IV	
PENUTUP	167



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran.....	23
Tabel 2. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	26
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon	31
Tabel 3. 1Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3. 2Capaian target dan realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018	47
Tabel 3. 3 Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018	111
Tabel 3. 4Tabel Penggunaan Anggaran dan Program	132
Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Tahun 2018	156



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Kinerja Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kota Cirebon mendapatkan

delegasi untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Statistik, Bidang Persandian, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Pembagian Urusan Bidang kelautan dan Perikanan, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian Daerah kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada masyarakat pada umumnya dan warga Kota Cirebon pada khususnya secara baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Tahun 2018 ini memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2018 sekaligus juga menggambarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pencapaian visi dan misi yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018, sehingga dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dideskripsikan apa saja yang sudah dilakukan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan di Kota Cirebon.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pelaporan kinerja pemerintah daerah kota Cirebon dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2018 sesuai dengan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja terukur yang telah dan seharusnya dicapai, dan menyediakan media tolak ukur capaian kinerja dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kota Cirebon.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKIP Kota Cirebon, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah;
6. Peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kota Cirebon;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
9. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018.
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi sebagai berikut

- a. Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
- b. Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- o. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- r. Dinas Lingkungan Hidup; dan
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- t. Inspektorat Kota Cirebon;
- u. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- v. Badan Keuangan Daerah;
- w. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- x. Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
- y. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- z. Satuan Polisi Pamong Praja.
- aa. Kecamatan sebanyak 5 Kecamatan.

1.5. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, sebagai berikut:

a. Lingkungan Hidup

Pembangunan harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi. Beberapa isu dalam urusan Lingkungan Hidup yang harus menjadi perhatian adalah:

- 1) Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pengendalian pencemaran air (air tanah dan air permukaan), serta pengendalian pencemaran udara dan kebisingan.
- 2) Pengendalian kerusakan lingkungan meliputi :
 - Pengendalian erosi, Abrasi dan akresi pantai,
 - Pengendalian penurunan muka tanah (deplesi) dan intrusi air laut,
 - Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut
 - Terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan

3) Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang memberikan dampak pada peningkatan kerentanan wilayah Kota Cirebon yang merupakan kota dengan kondisi topografi berupa dataran rendah dan pesisir. Selain itu, perubahan iklim akan meningkatkan potensi dan kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian iklim ekstrim dan bencana hidrometrologis seperti banjir rob. Dampak lain dari perubahan iklim juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan terutama yang tinggal di kawasan pesisir. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam mewujudkan hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi iklim dan rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim.

4) **Penanggulangan Bencana**

Berbagai potensi bencana hampir dapat dipastikan selalu mengancam Kota Cirebon. Berbagai potensi bencana tersebut antara lain banjir (termasuk rob dan genangan), tanah longsor, pohon tumbang dan kebakaran. Perlu upaya peningkatan mitigasi bencana khususnya bagi masyarakat untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar.

b. Pengelolaan Sampah

Dalam sektor kebersihan, faktor-faktor yang menjadi isu antara lain :

- 1) Volume atau laju timbunan sampah yang setiap tahun meningkat.
- 2) Pola pelayanan yang masih menggunakan pola lama yaitu kumpul, angkut, buang.
- 3) Regulasi dan penegakan hukum yang masih lemah.
- 4) Peran serta masyarakat yang masih harus ditingkatkan.
- 5) Keterbatasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sampah.
- 6) Pemanfaatan sampah untuk produk industri kreatif.

c. Pekerjaan Umum

Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran drainasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringannya yang cukup dan baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan peluang positif bagi pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya suatu daerah. Pembangunan dan upaya peningkatan sektor pekerjaan umum selama ini sudah dilakukan dan akan tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang.

Infrastruktur di wilayah selatan Kota Cirebon dan wilayah yang berbatasan dengan daerah lain kondisinya masih relatif kurang dibanding dengan wilayah perkotaan. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat perekonomian, pendidikan dan

kesehatan, sehingga angka IPM di wilayah ini tercatat merupakan yang terendah di Kota Cirebon.

Pada tahap 2013-2018 ini, pembangunan maupun pengembangan infrastruktur yang perlu menjadi prioritas perhatian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengendalian banjir dan antisipasi pasang laut/rob Banjir, rob, dan genangan merupakan ancaman bencana yang menjadi isu yang harus diprioritaskan penanganannya. Bencana tersebut diakibatkan oleh banjir kiriman, hujan lokal, dan kenaikan muka air laut. Penanganannya masing-masing berbeda namun harus menjadi satu kesatuan strategi.
- 2) Tingginya tingkat kerusakan jalan, termasuk saluran drainase dan prasarana jalan.
- 3) Masih terbatasnya prasarana jalan di Wilayah Selatan (Kelurahan Argasunya), perlu upaya untuk dapat memperlebar jembatan tol yang ada sehingga lebih representatif.
- 4) Perlunya mengantisipasi tingkat kemacetan jalan yang semakin padat, khususnya pada perlintasan sebidang dengan moda transportasi lain (kereta api).
- 5) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air di wilayah selatan (kelurahan Argasunya).
- 6) Ketergantungan pada sumber air Pamiis sebagai sumber air baku PDAM Kota Cirebon yang melayani kebutuhan air bersih skala Kota.
- 7) Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

d. Penataan Ruang

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengoperasionalkan

pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas.

Penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya akan dapat berjalan baik bilamana aturan mainnya dapat ditegakkan secara konsisten dan terkendali dalam situasi pembangunan yang semakin menggeliat. Oleh karena itu, beberapa permasalahan terkait urusan penataan ruang yang perlu menjadi perhatian pada periode tahun 2013-2018 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan peraturan daerah terkait aspek-aspek pengendalian ruang seperti rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insenti-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota.
2. Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah yang secara ekologis berfungsi untuk meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, selain fungsi sosial ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan landmark. untuk Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal
3. Perlu pengendalian perijinan pada wilayah yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan yang sudah menurun.
4. Perlu ditetapkan kebijakan *Green Building*
5. Kurang optimalnya pengelolaan aset pemerintah sebagai fungsi RTH.

e. Perumahan

Perumahan dan permukiman yang baik seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Infrastruktur tersebut antara lain air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, kelayakan kondisi rumah dan lingkungan permukimannya. Beberapa

permasalahan terkait urusan perumahan yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan ruang publik. Masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori kumuh.
- 2) Perlunya penataan dan pengembangan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat keterbatasan lahan dan tingginya nilai lahan.
- 3) Perlu optimalisasi penataan Tempat Pemakaman Umum.

f. Perhubungan

Permasalahan pembangunan urusan perhubungan pada periode tahun 2013-2018 yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah :

- 1) Kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh padatnya kendaraan juga prediksi kemacetan akan semakin meningkat seiring dengan berfungsinya dua double track kereta api yang melintasi Kota Cirebon.
- 2) keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan khususnya di wilayah selatan dan perbatasan kota.
- 3) Kondisi kuantitas dan kualitas angkutan umum yang memerlukan pembenahan.
- 4) Tingkat keselamatan berlalu lintas yang harus ditingkatkan.
- 5) perlunya moda transportasi massal yang nyaman dan representatif.
- 6) keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana perparkiran.

g. Komunikasi dan Informasi

Permasalahan pembangunan urusan komunikasi dan informasi pada periode tahun 2013-2018 yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah:

1. Keterbukaan informasi publik
2. Perkembangan Teknologi Informatika (E-Gov dan E-city)

h. Pertanahan

Tertibnya administrasi pertanahan merupakan salah satu indikator kepastian kepemilikan lahan. Permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian pada periode tahun 2013-2018 untuk urusan pertanahan, sebagai berikut :

- 1) Belum tuntasnya penetapan batas wilayah dengan Kota.
- 2) Administrasi kepemilikan tanah termasuk asset tanah pemerintah daerah belum tertib.
- 3) Belum adanya master plan tanah timbul.
- 4) Penataan aturan penerbitan sertifikat tanah timbul.
- 5) Penguatan kelembagaan pengelolaan tanah timbul.

i. Energi dan Sumber daya mineral

Permasalahan terkait urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap penambangan galian C liar
- 2) Belum optimalnya elektrifikasi rumah tangga.

j. Kesehatan

Perubahan iklim global menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan guna lahan secara lokal yang berdampak terhadap menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Penyakit-penyakit yang terjadi akibat perubahan iklim cenderung meningkat dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Upaya preventif perlu dilakukan sejak sekarang dengan

mengembalikan dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekitar diantaranya dengan meningkatkan standar kualitas sanitasi masyarakat.

Dengan meningkatnya karakteristik urban yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan dan pusat aktifitas kota, akan mengakibatkan bertambahnya jam kerja seseorang. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap makanan yang siap saji atau makanan yang disajikan di luar rumah. Data yang ada menunjukkan kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular pada masyarakat kota termasuk Kota Cirebon. Hal ini menunjukkan terjadi transisi penyakit epidemiologi dari penyakit menular ke tidak menular. Hal penting yang perlu dilakukan diantaranya dengan Upaya kesehatan masyarakat promotif dan preventif dengan menjalankan kuratif dan rehabilitatif.

k. Pendidikan

Sebagai daerah yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, Kota Cirebon termasuk yang memiliki angka indeks pendidikan tertinggi se wilayah Ciayumajakuning. Rata-rata lama sekolah mendekati 10 (sepuluh) tahun, namun ini masih jauh dari target rata-rata lama sekolah Kota Cirebon yaitu 12 tahun. Angka putus sekolah terutama untuk tingkat SMA masih jauh dari harapan sementara untuk tingkat SD dan SMP sudah sesuai target. Salah satu aspek penting untuk menurunkan angka putus sekolah adalah dengan mengalokasikan biaya operasional sekolah hingga tingkat SMA.

Untuk mengejar ketertinggalan dan mempertahankan rata-rata lama sekolah yang ada, maka perlu dicanangkan wajib belajar bukan hanya hingga 12 tahun tetapi hingga 15 tahun sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Cirebon adalah setingkat SMA. Selain itu untuk membantu masyarakat Kota Cirebon yang akan melanjutkan jenjang pendidikan menengah ke pendidikan tinggi, pemerintah kota perlu mengalokasikan anggaran untuk beasiswa perguruan tinggi bagi

warga kota yang akan melanjutkan pendidikan terutama untuk kalangan tidak mampu.

Isu strategis lainnya di bidang pendidikan mencakup mutu tenaga pendidik yang diharapkan selama lima tahun ke depan 90 persen tenaga pendidik di Kota Cirebon telah bersertifikasi.

I. Sosial

Salah satu isu strategis di bidang sosial adalah soal kemiskinan. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, pendataan yang masih belum seragam menjadi salah satu kendala dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam pelayanan kesehatan keluarga miskin. Dengan diterapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai tahun 2014 maka perlu ditingkatkan upaya-upaya untuk mendukung pemberlakuan program tersebut.

Angka pengangguran yang cukup tinggi perlu upaya peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat, selain terkait pula dengan tingkat pendidikan. Peningkatan daya saing masyarakat Kota Cirebon perlu dilakukan mengingat pada tahun 2015 akan diterapkan *Asean Free Trade*.

Sebagai salah satu kota dengan lahan yang minim pertanian dan perkebunan, maka aspek ketahanan pangan bagi Kota Cirebon menjadi penting. Oleh karena itu perlu diupayakan perlindungan terhadap kawasan-kawasan produktif pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

m. Perlindungan Anak Perempuan

Isu strategis dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta pentingnya pemahaman pengarusutamaan gender, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Isu strategis lainnya dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun kesadaran mulai dari tingkat bahwa terutama di tingkat RT atau RW. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya membuat kawasan percontohan RW ramah anak atau RT ramah anak. Selain itu di tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum perlu diupayakan pula untuk menjadi ramah anak misalnya di terminal dan stasiun Kereta Api.

n. Aspek Ekonomi Keuangan

Beberapa isu strategis dalam bidang ekonomi keuangan adalah:

- 1) Perlunya penyederhanaan perizinan, insentif dan disinsentif investasi, dan penerapan sanksi pelanggaran tata ruang, hal ini terkait dengan investasi yang berkembang semakin pesat di Kota Cirebon.
- 2) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, terutama dengan melibatkan lingkungan alternatif misalnya pondok pesantren, mesjid, dan kelompok pemuda.
- 3) Penanganan sektor informal terutama pedagang kaki lima dengan mengalokasikan ruang, baik yang sudah dimiliki atau membebaskan baru untuk keberadaan PKL dalam rangka pembinaan sektor informal menjadi formal.
- 4) Pelestarian budaya dan aset wisata daerah terutama dengan banyaknya potensi wisata ziarah dan berbasis kelislaman di Kota Cirebon.

o. Aspek Pemerintahan

Dalam rangka mendukung kinerja Pelayanan Pemerintahan Kota Cirebon diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan

penegakan hukum, pengendalian ketenteraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi aman, tenteram, tertib dan teratur. Selain itu, diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana termasuk potensi terjadinya kebakaran. Kondisi yang tenteram dan tertib dapat dicapai melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

Untuk mendukung kinerja Pemerintahan Kota Cirebon, diperlukan pembiayaan pembangunan yang signifikan. Walaupun dari tahun ke tahun APBD Kota Cirebon cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip *good governance*, akuntabilitas keuangan daerah kondisinya semakin baik sehingga dimungkinkan untuk menggali potensi pembiayaan non-konvensional. Pembiayaan pembangunan non-konvensional dilakukan melalui peran serta masyarakat dan dunia usaha yang proporsional untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema *Public Private Partnership* (PPP), maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta skema lainnya dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi

badan usaha daerah dan swasta serta lembaga- lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Terkait dengan indeks persepsi korupsi yang masih belum memenuhi standar, maka diperlukan upaya konsisten untuk melaksanakan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang telah disahkan melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Cirebon 2012 – 2017. Selain upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan walikota tersebut.

1.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon, berbagai hal dirumuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2018. Adapun prioritas pembangunan yang telah ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata dan berkelanjutan
5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

a. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Adapun Visi Kota Cirebon 2013-2018 yang telah dicanangkan 2013-2018 adalah “ **Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018**”.

Pernyataan visi tersebut memiliki 5 (lima) kata utama yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Cirebon pada akhir tahun 2018. Penjelasan masing-masing kata tersebut, adalah sebagai berikut:

Religius

Makna religius berarti bahwa Pemerintah dan Masyarakat Kota Cirebon dalam melaksanakan aktivitasnya baik dalam kehidupan keluarga, bertetangga maupun dalam pekerjaannya sehari-hari senantiasa berlandaskan pada norma dan syariat agama yang dianutnya. Sikap hidup yang religius adalah sikap hidup yang menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Aman

Kota Cirebon menjadi kota yang aman, yaitu kota yang bebas dari berbagai bahaya yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta penyakit – penyakit masyarakat (pekat). Dalam kondisi yang seperti itu, seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini, maka upaya penciptaan kamtibmas secara optimal menjadi prioritas pembangunan, karena hal itu akan mempengaruhi kondusivitas bidang-bidang pembangunan lainnya.

Maju

Kota Cirebon menjadi kota yang maju, artinya kota yang berkembang ke arah yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupannya. Kota yang maju adalah kota yang memiliki daya saing tinggi di dibandingkan dengan kemajuan kota-kota lain di kawasan regional maupun nasional. Untuk itu, pelaksanaan seluruh aspek pembangunan di kota Cirebon harus berorientasi pada kemajuan dan peningkatan daya saing di segala bidang, dengan berbasis pada sistem budaya dan kearifan lokal, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Cirebon.

Aspiratif

Kota Cirebon menjadi kota yang aspiratif, yaitu kota yang berbasis pada aspirasi masyarakat. Dengan visi ini, maka perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan senantiasa memperhatikan aspirasi dan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Berbagai unsur yang dapat diserap aspirasinya atau diminta keterlibatannya antara lain adalah pihak swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, pers/media, lembaga swadaya masyarakat, kelompok perempuan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat, para budayawan, organisasi kemasyarakatan, dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Hijau

Kota Cirebon menjadi kota hijau, artinya kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Dengan visi ini, maka pembangunan kota Cirebon senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Taman-taman kotanya tampak indah dan asri, jalan-jalannya bersih, trotoarnya tertata rapi, halaman kantor dan perumahan perumahannya hijau.

Untuk mencapai visi tersebut, kepala daerah menyusun misi-misi dengan rumusan sebagai berikut.

Misi Ke-1: “Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius”

Misi Ke-2: “Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasikelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN”

Misi Ke-3: “Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum”

Misi Ke-4: “Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat”

Misi Ke-5: “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan”

Misi Ke-6: “Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup”

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi Kota Cirebon 2008-2013 yang kemudiandijabarkan dalam standar kinerja yang harus dicapai pada Sasaran. Hasil perumusan tujuan dan sasaran disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan.	Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan.
2.	Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan.➤ Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan.➤ Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Tujuan	Sasaran
		harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing.
3.	Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional. ➤ Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD. ➤ Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah. ➤ Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan. ➤ Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan.
4.	Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD
5.	Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mangayomi dan komunikatif.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tercapainya kesepakatan penetapan batas wilayah dengan Kota Cirebon
6.	Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
7.	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika
8.	Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum
9.	Menegakkan peraturan dan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya tingkat pelanggaran perda
10.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya RW K-3
11.	Meningkatkan tertib lalu lintas dan perparkiran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
12.	Meningkatkan penataan sektor informasi untuk mendukung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertatanya sektor informasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Tujuan	Sasaran
	ketertiban dan keindahan kota	
13.	Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana	➤ Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana
14.	Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat	➤ Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan
15.	Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat	➤ Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat. ➤ Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
16.	Meningkatkan olah raga prestasi	➤ Berprestasi ditingkat provinsi
17.	Mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota pusaka	➤ Meningkatkan jumlah pusaka budaya yang dilestarikan
18.	Meningkatkan daya beli masyarakat	➤ Meningkatnya indeks daya beli masyarakat
19.	Menurunkan jumlah keluarga miskin	➤ Menurunnya jumlah KK miskin
20.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	➤ Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
21.	Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	➤ Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
22.	Meningkatkan pengarusutamaan gender	➤ Terpenuhinya kesetaraan gender
23.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	➤ Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang Kecamatan. ➤ Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW
24.	Mewujudkan lingkungan kota bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota	➤ Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman ➤ Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. ➤ Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA
25.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	➤ Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Tujuan	Sasaran
		<p>pergerakan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim. ➤ Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal ➤ Tersedianya sistem pengelolaan air minum
26.	Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap tata ruang kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
27.	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan ➤ Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni ➤ Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.

Tabel 2. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : “Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun2018			
1.	Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius	<p>a. Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan.</p> <p>b. Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat.</p>	<p>a. Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan.</p> <p>a. Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan.</p> <p>b. Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan.</p> <p>c. Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis</p>



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			dansaling menghargaiterhadapajaran agamanya masing-masing.
2.	Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN	a. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur daerah, pencapaian target pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas APBD	a. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional. b. Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD. c. Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah. d. Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan. e. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan.
		b. Meningkatkan penataan struktur dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah agar berfungsi optimal.	a. Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD. b. Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.
		c. Membangun suasana pemerintahan yang harmonis, mangayomi dan komunikatif.	a. Tercapainya kesepakatan penetapan batas wilayah dengan Kota Cirebon.
		d. Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif,	a. Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
		efisien, transparan dan akuntabel.	
3.	Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum	a. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta bangsa dan tanah air Indonesia.	a. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika.
		b. Meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran hukum masyarakat.	a. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum.
		b. Menegakkan peraturan dan perundang-undangan	a. Menurunnya tingkat pelanggaran perda
		b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam aspek kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan.	a. Terwujudnya RW K-3
		b. Meningkatkan tertib lalu lintas dan perpakiran	a. Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
		b. Meningkatkan penataan sektor informal untuk mendukung ketertiban dan keindahan kota	a. Tertatanya sektor informal
		b. Meningkatkan daya tanggap pemerintah dan masyarakat terhadap situasi bencana	a. Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan,	a. Mengoptimalkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.	b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat	c. Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.	b. Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat
			c. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		d. Meningkatkan olah raga prestasi	a. Berprestasi di tingkat provinsi
		e. Mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Pusaka	a. Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan
		f. Meningkatkan daya beli masyarakat	a. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat
		g. Menurunkan jumlah keluarga miskin	a. Menurunnya jumlah KK miskin
		h. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	a. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		i. Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	a. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
		j. Meningkatkan pengarusutamaan gender	a. Terpenuhi kesetaraan gender
5.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	a. Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan
			b. Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW
6.	Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan	a. Mewujudkan lingkungan Kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi	a. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
	hidup	warga kota.	b. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup
			c. Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA
		b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	a. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat.
			b. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim
			c. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
			d. Tersedianya sistem pengelolaan air minum
		c. Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap tata ruang kota	a. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
		b. Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat dan perhubungan	a. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
			b. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			c. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kota Cirebon menetapkan 42 sasaran strategis yang mencakup 55 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018. Adapun rincian IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
1.	Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	a.	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD
2.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan	a.	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya
3.	Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan		Prestasi lomba keagamaan 3 besar tingkat provinsi
4.	Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat		Tidak adanya kasus konflik



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
	beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing		yang bernuansa agama
5.	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	a.	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan
		b.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS
6.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	a.	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di tahun 2018
		b.	Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100 %
7.	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	a.	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan
		b.	Meningkatnya arsip vital dan arsip statis
8.	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan
		b.	Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon
9.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	a.	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
10.	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD	a.	Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di tahun 2018
11.	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kota Cirebon	a.	Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100 %
12.	Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	a.	Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-government 100%
		b.	Terpenuhinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%
13.	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam kebhineka tunggal-ika-an	a.	Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus
14.	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	a.	Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik
15.	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	a.	Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 Perda bisa ditegakkan
16.	Terwujudnya RW K-3	a.	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50 %



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
17.	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	a.	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan
18.	Tertatanya sektor informal	a.	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya =0,3
19.	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	a.	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana (TKB) dan waktu tanggap darurat bencana (TDB)
20.	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	a.	Meningkatnya Lama Harapan Sekolah pada usia max 18 tahun
		b.	Rata - rata lama sekolah (13 Tahun)
21.	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	a.	Angka harapan hidup 71,1 tahun
22.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	a.	Meningkatnya Peserta KB Aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS
23.	Berprestasi di tingkat provinsi	a.	Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018
24.	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	a.	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
		b.	Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 Jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)
25.	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	a.	Indeks daya beli dari 62,35 menjadi 65 point
		b.	Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018
26.	Menurunnya jumlah KK miskin	a.	rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota dari 30,24% menjadi 25%
27.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	a.	Jumlah kasus dari 30 kasus menjadi 20 kasus
28.	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	a.	Penurunan PMKS 5 % di Tahun 2018
29.	Terpenuhinya kesetaraan gender	a.	Rasio gender di atas 30% perempuan
30.	Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan	a.	Persentase kenaikan nilai Musrenbang Kecamatan yg diakomodir dalam APBD sebanyak 5 % sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
31.	Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW	a.	Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW
32.	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permakaman	a.	luas ruang terbuka hijau publik menuju 12 % pada akhir tahun 2018
33.	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	a.	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)
		b.	Prosentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Baku Mutu Lingkungan (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%)
		c.	Meningkatnya pelayanan Konservasi SDA (Rata-rata Outcome)
		d.	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)
34.	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	a.	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
35.	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	a.	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%
		b.	Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100 %
36.	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	a.	Berkurangnya Titik Rawan Genangan Banjir dari 18 titik menjadi 10 titik
37.	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	a.	Cakupan pelayanan air limbah domestik 92% menjadi 100%
		b.	Jumlah jamban dan septiktank 76, 45 % (65.766 Rumah Tangga)
38.	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum	a.	Cakupan pelayanan air minum non perpipaan
39.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	a.	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus
40.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	a.	berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 20 %
41.	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	a.	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	
42.	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	a.	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya nilai implementasi nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	100
2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio tempat ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana dibandingkan dengan tempat ibadah yang mengusulkan bantuan sarana dan prasarana	90%
3.	Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi	6 besar tingkat provinsi
4.	Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing.	Tidak adanya kasus konflik bernuansa keagamaan	0%
5.	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki	1. Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	integritas dan profesional	2. Menurunnya pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	3 kasus/1000 PNS
6.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	WTP
7.	Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD	Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan	100%
8.	Terwujudnya administrasi kearsipan daerah	1. Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	14/70
		2. Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1060 arsip	1060 arsip digital
9.	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 90%	90 poin
10.	Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon	400 M (PMA) 600 M (PMDN)
11.	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	90 Poin
12.	Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif	Jumlah bangunan dan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	80%
13.	Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan	80 poin
14.	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kota Cirebon	Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100%	25 titik
15.	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan	1. Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-government 100%	100% (1 peraturan e-government)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi	2. Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	50 sistem yang terbangun
16.	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus	0 kasus
17.	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	1. Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	15%
		2. Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban dan umum 15% setiap tahun dari 45 titik	10 titik
18.	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	50%
19.	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan	6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan
20.	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya 40%	40%
21.	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari
22.	Terbukanya kesempatan yang luas bagi	1. Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun	18 Tahun



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	masyarakat untuk mengenyam	2. Rata-rata lama sekolah (13tahun)	13 Tahun
23.	Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat	1. BOR (%)	80,64
		2. LOS (hari)	4,48
		3. TOI (hari)	1,27
		4. BTO (kali)	43,35
		5. NDR (kematian 48 jam/1000)	22,56‰
		6. GDR (kematian kasar/1000)	44,28‰
		7. Survei kepuasan pasien/pelanggan	85%
		8. KK ber-PHBS	75%
		9. Angka kematian Ibu	3 orang
		10. Angka kematian bayi	50 bayi
		11. Gizi buruk	<1%
		1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin	100%
		2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%)	77,50%
24.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS	75%
25.	Terwujudnya prestasi olahraga di tingkat provinsi	Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018	10 besar tingkat provinsi
26.	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	1. Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	50%
		2. Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 cagar bangunan di tahun 2012)	80%
27.	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	1. Indeks daya beli	65
		2. Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	4444.959 orang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
28.	Menurunnya jumlah KK miskin	Rasio KK miskin dibandingkan KK kota	25%
29.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunnya kasus	53 kasus
30.	Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan PMKS 5% pada tahun 2018	5% (3.685 orang)
31.	Terpenuhi kesetaraan gender	Rasio gender di atas 30 % perempuan	40%
32.	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan	Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	5%
33.	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW	Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	10%
34.	Meningkatnya luasan dan kualitas ruangan terbuka hijau publik dan privat	Meningkatnya luas ruangan terbuka hijau menuju 12%	9,81%
35.	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)	90%
		2. Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%)	78%
		3. Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		SDA (rata-rata outcome)	
		4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)	80%
36.	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	1. Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	80%
		2. Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste baik 100%	100%
37.	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	1. Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	100%
		2. Proporsi jumlah jembatan kondisi baik	100%
38.	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim.	Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	10 titik
39.	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	1. Cakupan pelayanan air limbah domestik	100%
		2. Jumlah jamban dan septiktank 76,45% (65,766 rumah tangga)	76,45%
40.	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum perpipaan	80%
41.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	0 kasus
42.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan pemukiman kumuh menjadi 20%	20%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
43.	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	16.256 rumah
44.	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	90%

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cirebon. setiap akhir tahun setiap instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2018 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2013-2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 1Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Pelaksanaan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon merupakan penerapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, dan tahun 2018 merupakan tahun ke-5 dengan berdasarkan RPJMD tersebut.

Secara umum pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama tahun 2018 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Tabel 3. 2Capaian target dan realisasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN SASARAN
Misi ke-1 "Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius"					
	Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	100%	45%	45%
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio tempat ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana dibandingkan dengan tempat ibadah yang mengusulkan bantuan sarana dan prasarana peribadatan	90%	n/a	
	Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi	6 besar tingkat provinsi	n/a	
	Terciptanya suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Tidak ada kasus konflik bernuansa keagamaan	0%	0%	100%
Misi ke-2 "Meningkatkan nilai integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas KKN"					
	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	100%	72%	72%
		Menurunnya pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	3 kasus / 1000 PNS	4 kasus / 1000 PNS	66,67%
	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di tahun 2018	WTP	WTP	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN SASARAN
	Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD	Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan	100%	98,90%	98,9%
	Terwujudnya administrasi kearsipan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	14/70	n/a	
		Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1060 arsip	1060 arsip digital	n/a	
	Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan 90%	90 poin	78,87 poin	87,63%
	Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon	400 M (PMA) 600 M (PMDN)	1.733 M (PMA) 1.620 M (PMDN)	433,25% 270,33%
	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	90 poin	n/a	
	Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif	Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	80%	80%	100%
	Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sebesar	80 poin	80 poin	100%
	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100%	25 titik	n/a	
	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100%	100% (1 peraturan e-government)	100% (4 peraturan 3-government)	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN SASARAN
	mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi				
		Terpenuhinya teknologi informasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	50 sistem yang terbangun	22 sistem yang terbangun	44%
	terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus	0 kasus	0 kasus	100%
	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	15%	n/a	
		Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban dan umum 15% setiap tahun dari 45 titik	10 titik	20 titik	100%
	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	50%	50%	100%
	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan	6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan	6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan	100%
	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya 40%	40%	45,86%	114,65%
	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN SASARAN
			waktu tanggap darurat bencana 7 hari	menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	
	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam	Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun	18 tahun	13,08 tahun	72,66%
		Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	13 tahun	9,88	76%
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	BOR (%)	80,6	57,09	70,83%
		LOS (hari)	4,48	4,20	93,75%
		TOI (hari)	1,27	3,11	57%
		BTO (kali)	43,35	12,68	169,94%
		NDR (Kematian 48 jam/1000)	22,56 ‰	43,04	190,78%
		GDR (kematian kasar/1000)	44,28 ‰	75	169,37%
		Survei kepuasan pasien/pelanggan	85%	81,43	95,8%
		KK ber-PHBS	75%	75,22	100,29%
		Angka kematian ibu	3 orang	3	100%
		Angka kematian bayi	50 bayi	17	166%
		Gizi buruk	< 1%	0,17	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%)	77,50%	100	129,03%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN SASARAN
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS	75%	63,11	84,11%
	Terwujudnya prestasi olahraga di tingkat provinsi	Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018	10 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi	100%
	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	50%	40,15%	80,3%
		Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 cagar bangunan di tahun 2012)	80%	73%	91,25%
	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli	65	n/a	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	444.959 orang	1.808.544 orang	406,45%
	Menurunnya jumlah KK miskin	Rasio KK miskin dibandingkan KK kota	25%	n/a	
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunnya kasus	53 kasus	65 kasus	122,64%
	Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Jumlah penanganan PMKS 5% pada tahun 2018	5% (3.685 orang)	n/a	
	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender di atas 30% perempuan	40%	3%	
Misi ke-5: "meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan"					
	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan	Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	5%	n/a	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN SASARAN
	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW	Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	10%	10%	100%
Misi ke-6: "meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup"					
	Meningkatnya luasan dan kualitas ruangan terbuka hijau publik dan privat	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau menuju 12%	9,81%	1,9%	77,33%
		Dihapus			
	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)	90%	69,6	77,33%
		Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan % (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%)	78%	77,5%	99,35%
		Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi SDA (rata-rata outcome)	100%	79,6%	79,6%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)	80%	69,6	87%
	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	80%	80%	100%
		Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste baik 100%	100%	n/a	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN SASARAN
	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	100%	100%	
		Proporsi jumlah jembatan kondisi baik	100%	100%	
	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	10 titik	8 titik	
	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik	100%	100%	100%
		Jumlah jamban dan septiktank 76,45% (65.766 rumah tangga)	76,45%	90,32%	118,14%
	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum perpipaan	80%	75,89	94,86%
	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	0 kasus	0 kasus	100%
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%	20 %	24,4%	122%
	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	16.256 rumah	846 rumah yang diperbaiki	5,31%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN SASARAN
	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	90%	100%	110%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu 2018, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan.

Misi ke-1: **“Mewujudkan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon yang Religius”**

Pencapaian misi untuk mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius, telah ditetapkan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	%	100	45	45%

Sumber: LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur.

Arah kebijakan

- mewajibkan pemerintah melaksanakan kegiatan keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-

tempat hiburan dan membuka kotak pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS.

Program

- Program peningkatan kualitas religius aparatur

Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cirebon, bahwa rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD adalah sebesar 45% dari target 100% yang diharapkan.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon selama tahun 2018, perangkat daerah yang melaksanakan pengajian rutin bulanan yaitu:

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Inspektorat;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
9. Dinas Pemadam Kebakaran;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Sekretariat DPRD;
12. Kecamatan Pekalipan;
13. Kecamatan Kejaksan;
14. Kecamatan Lemahwungkuk;
15. Kecamatan Kesambi; dan
16. Kelurahan Kalijaga

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keagamaan

Sasaran strategis tersebut mempunyai indikator sasaran yaitu:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio tempat ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana dibandingkan dengan tempat ibadah yang mengusulkan bantuan sarana dan prasarana	%	90	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah bansos serta kegiatan keagamaan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus masjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.

Program

- Program peningkatan kualitas sarana peribadatan.

3. Terwujudnya prestasi kota Cirebon bidang keagamaan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi	juara	6 besar tingkat provinsi	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan dan pelaksanaan lomba secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.

Arah kebijakan

- Pembinaan keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.

Program

- Program peningkatan kompetensi keagamaan.

4. Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tidak adanya kasus konflik bernuansa keagamaan	%	0	0	100%

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta keagamaan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.

Program

- Program kerukunan umat beragama.

Misi ke-2: “Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN”.

Pencapaian misi ke-2 sebagaimana tersebut di atas, telah ditetapkan sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	%	100	n/a	
Menurunnya pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	Kasus	3 kasus/ 1000 PNS	4 kasus / 1000 PNS	66,67%

Sumber: LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah.
2. Penerapan *reward* dan *punishment* dalam disiplin PNS.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan keterampilan.

2. Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan.
3. Melakukan pembinaan PNS secara berkala, penerapan *reward* dan *punishment*, pengawasan disiplin dan kotak pengaduan masyarakat.

Program

1. program pendidikan kedinasan.
2. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
3. program pembinaan dan pengembangan aparatur.

2. Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	Opini	WTP	WTP	100%

Sumber: LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.

Arah kebijakan

1. Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem
2. Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah.

3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).

Program

1. Program optimalisasi pengelolaan aset daerah.
2. Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Program peningkatan kualitas penganggaran dan realisasi APBD.
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

3. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan	%	100	98,90	98,9%

Sumber: LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD.
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

Arah kebijakan

1. Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya.

2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD.
3. Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah.
4. Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.

Program

1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Program pengembangan data/informasi perencanaan.
3. Program pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Program evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

4. Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	Unit kerja	14/70	n/a	
Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1060 arsip	Arsip	1060 arsip digital	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan.
2. Penyediaan arsip dalam bentuk digital.

Arah kebijakan

1. Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip.

2. Menyediakan dokumen arsip secara digital.

Program

1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

5. Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan 90%	Poin	90	78,87	87,6%

Sumber: LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Optimalisasi kelembagaan pelayanan perizinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan.

Arah kebijakan

- Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perizinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi.

Program

1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah menyelenggarakan proses pelayanan perizinan secara satu pintu, berdasarkan hasil survei

indeks kepuasan masyarakat, diketahui kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan perizinan terpadu masih belum sesuai target, hal tersebut disebabkan karena masih penyesuaian proses penerapan sistem perizinan terpadu yang terintegrasi secara elektronik melalui aplikasi online single submission (OSS). Penerapan OSS merupakan salah satu inovasi dari pemerintah pusat dalam penerapan proses perizinan namun dalam pelaksanaannya di daerah masih terdapat beberapa kendala baik dalam sistem aplikasi maupun jaringannya.

6. Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon	Rupiah	400 M (PMA)	1.733 M (PMA)	433,25%
		600 M (PMDN)	1.622 M (PMDN)	270,33%

Sumber: LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
2. Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal.

Program

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Secara garis besar kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Letak posisi kota Cirebon yang strategis ditambah infrastruktur yang sudah baik menambah poin penting peningkatan nilai investasi di Kota Cirebon.

7. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	Poin	90	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Program

1. Program pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Program pelayanan pencatatan sipil.
3. Program sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Program perencanaan kebijakan kependudukan.

8. Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	%	80	80	100%

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Program

1. Program pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Program pelayanan pencatatan sipil.
3. Program sistem informasi administrasi kependudukan.
4. Program perencanaan kebijakan kependudukan.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Saat ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon tengah melakukan inovasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan yang dinamakan “BROJOL BAE”, inovasi tersebut dilakukan agar seluruh penduduk Kota Cirebon khususnya yang baru lahir langsung mendapatkan akte kelahiran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Inovasi tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan rumah sakit maupun klinik melahirkan yang ada di Kota Cirebon, dimana peran dari

rumah sakit maupun klinik tersebut melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila ada warga kota Cirebon yang melahirkan.

9. Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati 100%	Titik	25	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon.

Arah kebijakan

- Menyelesaikan penegasan batas daerah antara kota Cirebon dengan kabupaten Cirebon.

Program

- Program pembinaan pemerintahan.

Masalah perbatasan antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon merupakan masalah klasik yang terus berlarut-larut, bahkan permasalahan tersebut harus diangkat dan dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Perkembangan infrastruktur, sarana perekonomian dan lainnya telah mengakibatkan adanya sedikit “kecemburuan” bagi masyarakat kabupaten untuk dapat turut menjadi warga kota Cirebon.

Penetapan batas daerah akhirnya terwujud dengan adanya peraturan menteri dalam negeri nomor 75 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten dan Kota Cirebon. Dengan adanya peraturan menteri dalam

negeri tersebut, maka pemerintah daerah kabupaten cirebon dan kota cirebon mengikuti peraturan tersebut sebagai penetapan batas di masing-masing wilayah tersebut.

10. Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tersedianya peraturan tentang e-government 100%	%	100	100%	100%

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

Arah kebijakan

- Mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan.

Program

- Program pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.

Perkembangan teknologi informatika telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan sistem pemerintahan. Saat ini perkembangan teknologi informasi diadopsi ke dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan e-government (electronic government). Penyelenggaraan e-government dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan namun mengurangi jalur birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Kota Cirebon telah melakukan terobosan dengan program smart city, dalam program smart city diharapkan masyarakat semakin sadar dengan keberadaan teknologi informasi namun juga tetap memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan teknologi tersebut. Dalam program smart city, pemerintah daerah telah membuat aplikasi-aplikasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

misi ke-3: “Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum”.

Pencapaian misi ke-3 tersebut di atas, ditetapkan dengan sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus	Kasus	0	0	100%

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan.

Arah kebijakan

- Meningkatkan peran lembaga/SKPD/kecamatan/kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan.

Program

- Program pengembangan wawasan kebangsaan.

Kota Cirebon adalah kota multi kultur dimana tingkat akulturasi budaya berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Selain itu posisi kota cirebon maupun perkembangan perekonomian di kota cirebon telah menarik

berbagai masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang budaya dan agama untuk bersama-sama membangun kota Cirebon.

Dalam perkembangan yang multi kultur tersebut, gesekan horizontal yang bersifat suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di kota Cirebon tidak ada. Masing-masing pihak maupun masyarakat telah memahami dan memiliki tenggang rasa yang tinggi terhadap perbedaan tersebut, semua hal yang berkaitan dan mengarah kepada timbulnya benih-benih perpecahan mampu diredam oleh para tokoh yang ada di Kota Cirebon.

2. Terwujudnya masyarakat sadar hukum

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	%	15	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan peran serta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum.
2. Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling.
3. Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan kantrantibmas.
4. Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum.
5. Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi ketertiban umum.

Program

1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
4. Program pembinaan pemuda di daerah rawan ketertiban umum.
5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban pemerintah daerah kota cirebon melalui satuan polisi pamong praja melakukan berbagai upaya diantaranya adalah:

1. Patroli 68, yaitu patroli yang dilaksanakan dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.00 setiap hari dengan jumlah personil sebanyak 5 orang.
2. Patroli siaga, yaitu patroli yang dilaksanakan setiap malam dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 24.00 yang dilaksanakan oleh 8 tim patroli dengan jumlah anggota sebanyak 69 orang.
3. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat pada 22 kelurahan.
4. Sosialisasi sistem perlindungan masyarakat tingkat kelurahan.
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional penertiban terpadu dan pekat untuk mengendalikan dan mengurangi penyakit masyarakat melalui operasi minuman beralkohol dan operasi PSK.

3. Terwujudnya RW K-3

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	%	50	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penilaian K-3 tingkat RW.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat.

Program

1. Program RW bersih.

4. Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan	Titik	6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan	6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan	100%

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurangi titik rawan kemacetan dan kecelakaan.
2. Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas.
3. Peningkatan keselamatan pelayaran.
4. Menata sistem parkir yang sudah ada serta menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih.

Arah kebijakan

1. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta rekayasa terhadap perlintasan sebidang.
2. Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan keselamatan pelayaran.
4. Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perparkiran terpadu, parkir di luar badan jalan (off street) serta menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir.

Program

1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
3. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
4. Program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.
5. Program peningkatan pelayanan parkir.

Adapun target dalam menurunkan titik rawan kemacetan dan rawan kecelakaan yang diselenggarakan oleh dinas perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Jalan siliwangi
2. Jalan tentara pelajar
3. Jalan cipto mangunkusumo
4. Jalan pemuda
5. Jalan pekiringan

Dalam upaya mengurangi titik rawan kemacetan dan rawan kecelakaan telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Operasi penertiban gabungan dengan kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya.
2. Memasang rambu pelican crossing di jalan siliwangi yang dapat menguranti tingkat kecelakaan terhadap pelajar.

3. Sosialisasi tentang pemahaman dan tata cara berlalu lintas di jalan raya.
4. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA.
5. Memasang lampu smart PJU dan lampu sorot (high mast)
6. Memasang marka ZOSS (zona selamat sekolah).
7. Pembinaan terhadap juru parkir di kota cirebon
8. Memasang marka jalan berupa marka tengah, marka tepi, zebra cross.
9. Menyelenggarakan bimbingan keselamatan lalu lintas terhadap satpam yang ada di sekolah-sekolah.

5. Tertatanya sektor informal

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya 40%	%	40	45,86	114,65%

Sumber: LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang bagi PKL.

Arah kebijakan

1. Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL.

Program

- Program pembinaan pedagang kaki lima.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menata pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Merelokasi pedagang kaki lima pada tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah kota cirebon sebanyak 50 pedagang kaki lima.
2. Memfasilitasi akses permodalan dan monitoring pedagang kaki lima yang berada di luar shelter yang menempati tempat sesuai aturan.

Perkembangan perekonomian Kota Cirebon boleh dikatakan lebih maju daripada wilayah sekitarnya sehingga menarik masyarakat untuk turut berusaha dalam sektor perekonomian di Kota Cirebon. Salah satu permasalahan yang ada dalam sektor perekonomian adalah munculnya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat yang bukan seharusnya. Keberadaan pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan kondisi kota cirebon yang terlihat kurang teratur dan tertib, hal tersebut diakibatkan karena pedagang kaki lima berjualan tanpa memperhatikan kaidah maupun keindahan kota.

Dalam upaya menata pedagang kaki lima yang ada, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan menyediakan tempat kepada para pedagang untuk tetap berjualan tanpa harus melanggar aturan yang ada. Namun hal tersebut nampaknya kurang maksimal, karena masih saja para pedagang kembali berjualan ke tempat semula dengan dalih tempat yang baru kurang memiliki pelanggan atau bahkan di tempat yang baru kurang layak untuk berjualan. Namun demikian pemerintah daerah telah memberikan langkah solusi kepada para pedagang kaki lima untuk tetap dapat berjualan tanpa harus melanggar aturan yang ada.

6. Meningkatkan daya tanggap terhadap bencana

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tingkat waktu tanggap kejadian bencana dan waktu tanggap darurat bencana	Waktu	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	100%

Sumber: LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana

Arah kebijakan

1. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana.
2. Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Program

1. program peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran.
 2. Program penanggulangan korban bencana.
 3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
- Keberadaan petugas pemadam kebakaran boleh dikatakan jarang diperhatikan, namun jika terjadi bencana kebakaran merekalah yang berada pada garis depan dalam memadamkan kobaran api. Pada tahun 2018 telah terjadi beberapa kali kebakaran di kota cirebon, akibat dari kebakaran tersebut telah mengakibatkan kerugian material yang tidak

sedikit. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kebakaran maupun personil yang menangani masalah kebakaran sehingga diharapkan semakin cepat dan responsif dalam menerima pengaduan masalah kebakaran.

misi ke-4: “Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat”

Pencapaian misi ke-4 sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun	Tahun	18	13,08	72,66%
Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	Tahun	13	9,88	76,76%

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya.
2. Peningkatan mutu tenaga pendidik.
3. Pengembangan pendidikan non formal dan informal

Arah kebijakan

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 12 tahun melalui BOP, penyediaan buku mata pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
3. Meningkatkan penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah.
4. Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan non formal dan informal di tingkat RW.
5. Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan kelurahan.

Program

1. Program manajemen pelayanan pendidikan.
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Program pendidikan menengah.
4. Program pendidikan non formal.
5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Program pendidikan anak usia dini.
7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui dinas pendidikan telah melakukan berbagai upaya menuju masyarakat kota Cirebon yang mengenyam pendidikan dasar. Berdasarkan hasil data tersebut di atas, rata-rata masyarakat kota Cirebon sudah mengenyam pendidikan hingga lulus SMP. Dan harapan lama sekolah masyarakat Kota Cirebon hingga lulus SMA.

Kualitas pendidikan baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas layanan sudah semakin baik, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya murid dari luar daerah yang ingin bersekolah di Kota Cirebon.

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
BOR	%	80,6	57,09	70,83%
LOS	Hari	4,48	4,20	93,75%
TOI	Hari	1,27	3,11	57%
BTO	Kali	43,35	12,68	169,94%
NDR (kematian 48 jam/1000)	‰	22,56	43,04	190,78%
GDR (kematian kasar/1000)	‰	44,28	75	169,37%
Survei kepuasan pasien/pelanggan	%	85	81,43	95,8%
KK ber-PHBS	%	75	75,22	100,29%
Angka kematian ibu	Orang	3	3	100%
Angka kematian bayi	Bayi	50	17	166%
Gizi buruk	%	<1	0,17	100%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin	%	100	100	100%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	%	77,5	100	129,03%

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

3. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.

Arah kebijakan

1. Mengembangkan kawasan percontohan perilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan (rukun warga, sekolah, perkantoran, tempat-tempat umum).
2. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
3. Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga kota Cirebon.
4. Menyediakan biaya operasional pelayanan kesehatan rujukan.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan lanjutan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus kelas III.

Program

1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
4. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
5. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
6. Program pelayanan kesehatan lanjutan.
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Adapun pencapaian kinerja untuk beberapa kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja terkait BOR, LOS, TOI, NDR GDR merupakan target kinerja yang dipergunakan untuk rumah sakit daerah Kota Cirebon, secara umum capaian BOR dan LOS termasuk kategori baik sedangkan TOI kurang baik karena tidak mencapai target efektif karena ada perpanjangan interval, BTO termasuk kurang baik juga karena realisasi BTO sebesar 58,79 masih berada di luar standar hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kunjungan rawat inap sehingga frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun tinggi. GDR termasuk kategori kurang baik dan NDR masuk dalam kategori kurang

baik juga karena standar angka normal kementerian kesehatan yaitu NDR 25‰ penyebabnya karena banyaknya pasien-pasien yang dirawat di RSD gunung jati merupakan rujukan dari RS lain yang sudah dalam keadaan sulit.

2. Pencapaian indeks kepuasan masyarakat khususnya terhadap pelayanan dasar kesehatan pada umumnya baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:
 - a) Keterbatasan SDM spesialis terutama spesialis radiologi yang jumlah seharusnya ada 5 orang, tetapi RSD hanya memiliki 2 orang dokter spesialis tetap ditambah 2 orang dari rumah sakit luar yang diperbantukan di RSD gunung jati, sehingga *respon time* menjadi sangat lama
 - b) Sarana dan prasarana fisik rumah sakit yang di beberapa bagian masih dalam pembangunan fisik yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan terutama ruangan yang menjadi terlihat kotor. Fasilitas umum seperti toilet di rawat jalan, ruang tunggu intensif terbatas dan kurang terawat.
 - c) Perubahan regulasi dari BPJS yang tidak konsisten sehingga berdampak terhadap sistem pelayanan di rumah sakit.
3. Angka kematian ibu (AKI) menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas, penanganan komplikasi pra rujukan dan rujukan. di kota cirebon pada tahun 2018 ada 3 per 5679 kelahiran hidup.
4. Angka kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun (bayi lahir dalam keadaan hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. Faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian bayi antara lain adalah tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, penanganan komplikasi kegawatdaruratan pra rujukan

dan rujukan, tingkat keberhasilan program KIA, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Pada tahun 2018 adalah 23 per 5651 lahir hidup jika dihitung per 1000 lahir hidup adalah 4 per 1000 lahir hidup. Penyebab kematian bayi pada tahun 2018 adalah BBLR, asfiksia, pneumonia, hyportemi dan sepsis.

5. Angka kasus gizi buruk tahun 2018 sebesar 0,17% (37 kasus dari 22.357 balita) sesuai target kemenkes di bawah 1%.

3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 daru jumlah PUS	%	75	63,11	84,11%

Sumber: LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengendalian kelahiran.

Arah kebijakan

- Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan.

Program

- Program keluarga berencana.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota cirebon melalui dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam upaya meningkatkan peserta KB aktif adalah:

1. Promosi peningkatan usia perkawinan melalui program genre.
2. Peningkatan pelayanan KB berkualitas melalui pelayanan KB melalui jaminan kesehatan nasional.

3. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.
4. Advokasi tentang pembangunan berwawasan kependudukan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.
5. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan.
6. Peningkatan partisipasi penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS).
7. Peningkatan pengetahuan tentang program KB khususnya kesehatan reproduksi bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama bagi PUS remaja.

4. Terwujudnya prestasi olahraga di tingkat provinsi

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018	Posisi	10 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi	100%

Sumber: LKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pembinaan atlet berprestasi
2. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga.

Arah kebijakan

1. Melakukan pembinaan atlet berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan.
2. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasaran olah raga.

Program

1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

Pada kegiatan pekan olah raga daerah (PORDA) tahun 2018, Kota Cirebon meraih peringkat 10 dengan total perolehan medali sebanyak 101 medali dengan komposisi 20 medali emas, 34 medali perak dan 47 medali perunggu.

5. Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	%	50	40,15	80,3%
Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 cagar bangunan di tahun 2012)	unit	80	73	91,25%

Sumber: LKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penetapan kalender budaya.
2. Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya.

Arah kebijakan

1. Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat event budaya khas Cirebon se wilayah Cirebon dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan keraton

2. Melakukan penataan/revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya dan kerjasama dengan pemilik budaya dalam upaya pelestarian.

Program

- Program pengelolaan keragaman budaya.
- Program pengelolaan kekayaan budaya.

6. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Indeks daya beli	Indeks	65	n/a	
Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	Orang	444.959	1.808.544	406,45%

Sumber: LKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tribina (manusia, usaha dan lingkungan).
2. Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja.
3. Peningkatan keterampilan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
4. Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan.
5. Peningkatan promosi wisata.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM.
2. Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan.
3. Meningkatkan kompetensi BLK.
4. Melaksanakan pelatihan keterampilan yang berorientasi pada penempatan langsung.
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
6. Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan.
7. Mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
9. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif. meningkatkan promosi wisata budaya khas cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Program

1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
4. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
5. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
6. Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
7. Program pelayanan penempatan tenaga kerja.
8. Program peningkatan ketahanan pangan.
9. Program pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

10. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan.
11. Program rehabilitasi hutan dan lahan.
12. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
13. Program peningkatan produksi peternakan.
14. Program peningkatan produksi perikanan tangkap.
15. Program peningkatan produksi perikanan budidaya.
16. Program pengembangan destinasi pariwisata.

Letak wilayah Kota Cirebon yang merupakan jalur penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah telah mengakibatkan wilayah Kota Cirebon turut berkembang dengan baik. Sarana transportasi yang semakin memudahkan pergerakan manusia juga turut andil menambah peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon. Saat ini sektor pariwisata di Kota Cirebon sudah berbenah diri dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Wisata kuliner maupun wisata belanja merupakan salah satu unggulan di Kota Cirebon, makanan khas Cirebonan maupun batik khas Cirebonan adalah salah satu diantaranya yang membuat para wisatawan maupun pengunjung datang ke Kota Cirebon. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin ramainya sentra kuliner maupun sentra belanja pada saat weekend, para pengunjung dan wisatawan datang untuk menikmati suasana maupun makanan Kota Cirebon.

Selain itu juga wilayah di sekitar Kota Cirebon, seperti Kabupaten Kuningan juga memiliki tempat-tempat pemandangan yang menarik dan terus dikembangkan sehingga mampu menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung.

7. Menurunnya jumlah KK miskin

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio KK miskin dibandingkan KK kota	%	25	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin.
3. Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

Arah kebijakan

1. Menyediakan satu data keluarga miskin.
2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.
3. Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa beasiswa rawan DO.
4. Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan.
5. Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin.
6. Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah.
7. Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi.
8. Memberikan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis mesjid dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin.

Program

1. Program satu data keluarga miskin.
2. Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan.

3. Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin.
4. Program peningkatan akses pelayanan kesehatan, rujukan bagi keluarga miskin.
5. Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi keluarga miskin.
6. Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin.
7. Program pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid untuk keluarga miskin.

8. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Menurunnya kasus	Kasus	53	65 kasus	122,64%

Sumber: LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Arah kebijakan

1. Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan rukun warga layak anak.

Program

1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan terhadap anak, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah membentuk forum WADUL BAE, dalam forum tersebut disosialisasikan kepada masyarakat tentang kekerasan dan juga meminta kesadaran masyarakat untuk turut pro aktif jika melihat ada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan terhadap anak. Selain itu anak-anak yang mengalami kekerasan dan yang sejenisnya akan ditampung dan diberikan konseling sehingga mampu mengurangi trauma anak akibat tindakan kekerasan. Penampungan tersebut dilakukan melalui rumah singgah, di dalam rumah singgah itu anak-anak diberikan bimbingan dan konseling dari pakar psikolog maupun pakar lainnya.

9. Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Jumlah penanganan PMKS 5% pada tahun 2018	%	5% (3.685 orang)	n/a	

Sumber: LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Penanganan PMKS.

Arah kebijakan

- Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial.

Program

1. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.

2. Program penguatan jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS.
3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

10. Terpenuhinya kesetaraan gender

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Rasio gender di atas 30% perempuan	%	40	n/a	

Sumber: LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penyajian data terpilah.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan peran dan keterwakilan gender di setiap kegiatan pembangunan.

Program

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Misike-5: “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan”

Pencapaian misi ke-5 sebagaimana tersebut di atas dapat diukur dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	%	5	n/a	

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan.

Arah kebijakan

- Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang.

Program

- Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Cirebon saat ini sudah mulai tumbuh dengan baik, proses perencanaan dari tingkat RT maupun RW kemudian sampai ke tingkat kota selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

Pelibatan peran serta masyarakat disebabkan karena penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya akan dinikmati oleh masyarakat, oleh karena itu masyarakatlah yang paling mengetahui pembangunan apa yang paling mereka butuhkan. Pemerintah daerah kota Cirebon telah menganggarkan program-program pembangunan untuk dapat dilaksanakan melalui kecamatan dan kelurahan.

Program pembangunan tersebut dilakukan juga dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaannya dalam bentuk swakelola.

2. Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/bantuan RW

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Persentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	%	10	10	100%

Sumber: LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan

- Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW.

Program

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.

Misi ke-6: “Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup”

Pencapaian misi ke-6 sebagaimana tersebut di atas diukur dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal pemakaman.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau menuju 12%	%	9,81	1,9%	77,33%

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan ruang terbuka hijau publik.

Arah kebijakan

- Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan yang menangani aset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH.

Program

1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau.
2. Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum.

2. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)	%	90	89,7	77,33%
Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan % (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%)	%	78	77,5	99,35%
Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi SDA (rata-rata outcome)	%	80	79,6	79,6%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)	%	80	69,6	87%

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Penyediaan data dan informasi serta instrumen SDA dan LH secara berkesinambungan.
2. Penerapan instrumen pengendalian dan pengawasan pencemaran, perusakan lingkungan.
3. Pengendalian pelaksanaan konservasi SDA.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Arah kebijakan

1. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penyediaan informasi SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfer, penanganan tanah timbul dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut.
2. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi.
3. Mengendalikan kerusakan dan konservasi SDA melalui pemantauan pemanfaatan SDA dan perubahan iklim.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH melalui bank sampah, green office, sekolah berbudaya lingkungan dan adipura.

Program

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Program perlindungan dan konservasi SDA.

Isu-isu mengenai lingkungan hidup mendapat perhatian penting dari seluruh masyarakat karena lingkungan merupakan tempat bagi setiap unsur manusia, hewan dan tumbuhan melangsungkan kehidupannya. Berkaitan dengan isu lingkungan hidup, pemerintah daerah kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya agar kualitas daya dukung lingkungan semakin baik. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah kota Cirebon telah melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan yang ada dengan melakukan pengambilan sampel di berbagai titik sampel, baik itu di sungai, laut maupun udara dan kebisingan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kota Cirebon, Pemerintah Daerah melakukan upaya meminimalisir dampak lingkungan dengan mewajibkan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) sesuai dengan kriteria kegiatannya, dengan dokumen tersebut setiap

pelaku usaha diwajibkan untuk berkomitmen mengelola dan memantau dampak yang diakibatkan dari usaha/kegiatannya terhadap lingkungan hidup sekitarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 diketahui bahwa:

1. Kualitas udara (parameter CO, SO₂, NO₂, O₃, HC, TSP, Pb di wilayah kota Cirebon masih berada pada ambang batas normal yang diperbolehkan.
2. Kualitas air sungai berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai secara keseluruhan yang mewakili 7 sub daerah aliran sungai yang ada di kota Cirebon telah tercemar sedang karena terdapat parameter dominan yang melebihi ambang batas yaitu dissolved solid (TDS), biochemical oxygen demand, ammonia (NH₃), Nitrite (NO₃), Chloride (CL) manganese (Mn) dan SURfactant, MBAS.
3. Kualitas air laut berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa air laut di 3 titik telah tercemar ringan berdasarkan parameter yang berlebih atau setidaknya sama yaitu kecerahan dan amonia.

3. Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	%	80	80	100%
Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 100%	%	100	n/a	n/a

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.

Arah kebijakan

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat (3R, RW zero waste) dan penyediaan sarana dan prasarana, kerjasama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR, meningkatkan TPA kopi luhur menjadi sanitary landfill, meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional.

Program

- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Pengelolaan sampah merupakan masalah klasik yang hampir sering ditemui diberbagai tempat. Penanganan sampah yang saat ini lebih menitik beratkan kepada memindahkan sampah dari lingkungan rumah tangga ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA), belum melakukan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi potensi sampah dari sumbernya.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengelola sampah, mulai dari penyediaan angkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membentuk bank sampah. Kaitannya dengan bank sampah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bahkan melakukan kerja sama dengan pegadaian kota cirebon dimana masyarakat bisa membeli emas dengan sampah melalui bank sampah. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam upaya mengurangi sumber sampah dan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna.

4. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	%	100	87	87%
Proporsi jumlah jembatan kondisibaik	%	100	100	100%

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan.

Arah kebijakan

- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan.

Program

- Program pembangunan jalan dan jembatan.

Keberadaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama bagi kemajuan suatu daerah, hal tersebut juga dipahami oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggaraan pembangunan di Kota Cirebon tidak hanya pembangunan kepada aspek manusianya saja, akan tetapi secara komprehensif membangun infrastrukturnya agar proses pembangunan lainnya dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan kelengkapannya serta jembatan.

5. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	Titik	10	8	80%

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

1. Pengembangan sarana dan prasarana drainase.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase.
3. Konservasi sumber daya air.

Arah kebijakan

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder.
2. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder.
3. Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah.

Program

1. Program pembangunan saluran drainase primer dan sekunder.
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer dan sekunder.

3. Program pengembangan pengelolaan air konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
4. Program pengendalian banjir

Banjir merupakan salah satu masalah yang semakin menghantui daerah perkotaan, tingkat curah hujan yang tinggi ditambah dengan daya dukung resapan tanah yang berkurang akibat berubahnya alih fungsi tanah yang semula merupakan daerah resapan menjadi daerah perumahan menjadi salah satu penyebabnya.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi titik rawan genangan maupun banjir salah satu diantaranya adalah dengan melakukan normalisasi fungsi saluran air. Saluran air yang baik diharapkan akan mengalirkan air menuju sungai yang nantinya bermuara ke laut. Secara rutin Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengerukan drainase dan saluran air agar fungsi saluran dapat berjalan dengan normal.

6. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Cakupan pelayanan air limbah domestik	%	100	100	100%
Jumlah jamban dan septiktank 76,45% (65.766 rumah tangga)	%	76,45	90,32%	118,14%

Sumber: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat.

Arah kebijakan

- Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengelolaan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL (sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat.

Program

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah.

Masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki jamban sehat sebanyak 30.780 penduduk, dan sampai dengan akhir tahun 2018 baru ada 1 kelurahan yang stop buang air besar sembarangan (SBS) yaitu kelurahan larangan.

Pemerintah daerah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan upaya dalam hal pembangunan pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat (IPAL Sanimas) di 6 lokasi untuk memenuhi sambungan rumah/kepala keluarga sejumlah 300 sambungan rumah atau sama dengan 1500 jiwa.

7. Tersedianya sistem pengelolaan air minum

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tingkat pelayanan air minum perpipaan	%	80	75,89	94,86%

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengembangan dan peningkatan sistem air minum non perpipaan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan.

Arah kebijakan

- Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas air baku.

Program

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melaksanakan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) perpipaan yang diselenggarakan melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai dengan tahun 2018, masyarakat Kota Cirebon yang sudah menikmati air minum tersebut berjumlah 241.395 penduduk (75,89%). Saat ini sumber air PDAM berasal dari mata air yang ada di Kabupaten Kuningan.

8. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	Kasus	0	0	100%

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

Arah kebijakan

1. Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan.
2. Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat-tempat lain yang mudah diketahui.

Program

1. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Program penyediaan sistem informasi pengendalian tata ruang.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan upaya dalam rangka pengendalian tata ruang, berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dari 34 kasus yang terjadi pada bangunan rumah tangga dan ruko yang membangun tanpa dilengkapi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk itu pengawas melakukan pengawasan di lapangan dan ditemukan terdapat bangunan yang sedang membangun setelah ditanyakan belum memiliki surat izin membangun bangunan, sehingga pengawas melakukan pendataan dan dilakukan teguran agar segera mengurus IMB.
2. 1 kasus pedagang kaki lima jalan perjuangan yang melanggar ketentuan sehingga pengawas lapangan/tata ruang mendata dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang rata-rata kasus yang terjadi hanya pada proses administrasi yang belum ditempuh oleh para pelaku.

9. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%	%	20	2,14	10,7%

Sumber: LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Penataan lingkungan kawasan permukiman kota.

Arah kebijakan

- Menata lingkungan permukiman dan meningkatkan penyediaan fasilitas umum dan jalan alternatif ke kawasan pengembangan perumahan.

Program

- Program lingkungan sehat perumahan.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.387-BAPPEDA/2015 luasan kawasan permukiman kumuh Kota Cirebon adalah 122,6 Ha. Pada tahun 2018 terjadi perubahan data lokasi penetapan kumuh berdasarkan keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.133-DPRKP/2018 luas kawasan permukiman kumuh adalah 315,91 Ha dikurangi pengurangan kawasan kumuh sampai tahun 2016 dan 2017 dengan luas 27,47 Ha sehingga luas permukiman kumuh pada tahun 2018 adalah 343,4 Ha, berkurang 13,55 Ha atau 2,14 % dari total luas wilayah Kota Cirebon.

10. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Rumah	16.256	864	5.31%

Sumber: LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Pengembangan rumah sehat sederhana.

Arah kebijakan

- Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milik yang murah (untuk mendekatkan tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya.

Program

- Program pengembangan perumahan.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 864 rumah.

11. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.

Sasaran strategi tersebut mempunyai indikator:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
		TARGET	REALISASI	
Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	%	90	100	110%

Sumber: LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2018

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan sebagai berikut:

Strategi

- Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan.

Arah kebijakan

1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan umum massal, meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan armada bus sedang, penambahan dan penataan trayek, penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan angkutan hari-hari besar.
2. Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, pejalan kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda.

Program

1. Program peningkatan pelayanan angkutan.
2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

Keberadaan transportasi umum merupakan salah satu prasyarat bagi kemajuan suatu daerah, tanpa adanya transportasi umum perkembangan perekonomian dan aspek lainnya akan berjalan kurang maksimal. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui dinas perhubungan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan cakupan layanan transportasi umum di Kota Cirebon.

Hingga tahun 2018, cakupan wilayah transportasi umum di Kota Cirebon sudah mencapai 100%, hampir seluruh pelosok wilayah bahkan wilayah yang menjadi perbatasan Kota Cirebon sudah ada transportasi umum. Keberadaan pengusaha online dalam transportasi umum turut menambah andil pencapaian cakupan wilayah transportasi umum.

Analisis Pencapaian Sasaran, Hambatan dan permasalahan yang dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

a. Analisis Pencapaian Sasaran

Beberapa hasil Pembangunan yang telah dicapai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya laju inflasi dari 4,36% pada tahun 2017 menjadi 2,80% pada tahun 2018. Penurunan ini dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat 3,54% dan rata-rata Nasional 3,13%.
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,29% pada tahun 2017 menjadi 9,06% pada tahun 2018. Penurunan ini masih berada di atas rata-rata Jawa Barat 8,22% dan rata-rata Nasional 5,5%.
3. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dari 66,45% tahun 2017 naik menjadi 68,03% pada tahun 2018. Peningkatan ini berada di atas rata-rata Jawa Barat 63,82%, namun masih dibawah rata-rata Nasional 69,20%
4. Meningkatnya angka harapan hidup dari 71,83 tahun pada tahun 2016, menjadi 71,89 tahun pada tahun 2017.
5. Menurunnya kasus gizi buruk dari 43 kasus pada tahun 2017 menjadi 37 kasus pada tahun 2018.
6. Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan dari 4 kasus pada tahun 2017 menjadi 3 kasus pada tahun 2018.
7. Menurunnya ibu hamil kurang energi kronis dari 14,4% pada tahun 2017 menjadi 13,8% pada tahun 2018.
8. Menurunnya balita stunting dari 13,42% pada tahun 2017 menjadi 10,1% pada tahun 2018.
9. Meningkatnya harapan lama sekolah dari 12,58 tahun pada tahun 2013, menjadi 13,15 tahun pada tahun 2017.
10. Meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 9,33 tahun pada tahun 2013, menjadi 9,96 tahun pada tahun 2017.
11. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat dari 71,81 pada tahun 2013, menjadi 72,81 pada tahun 2017.

12. Terbentuk dan terbinanya 76 koperasi dan pra koperasi berbasis RW atau lembaga ekonomi mikro berbasis RW, sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga.
13. Diraihnya penghargaan Top 10 pengelola pengaduan pelayanan publik tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
14. Diraihnya penghargaan *Top Information Technology On Information Technology Collaboration and inovation Development* dan *Top Leader On Information Technology Leadership* Tahun 2018.
15. Penghargaan Natamukti dari *Internasional Council For Small Business Indonesia City Award* Tahun 2018.
16. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018.
17. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan nilai “B” (Baik) pada tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada Tahun 2018 ada beberapa penghargaan yaitu :

1. Sembilan (9) penghargaan tingkat Nasional
2. Dua puluh Lima (25) penghargaan tingkat Provinsi

b. Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon Tahun 2018 secara umum dapat dikategorikan baik, namun terdapat beberapa indikator sasaran yang belum dapat dicapai dengan baik, yaitu:

- a. Pencapaian indikator “Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%” tidak tercapai dengan baik, selama pencapaian 5 tahun bisa dikatakan bahwa indikator tersebut tidak dapat tercapai dengan baik, jika menelaah bahwa urusan keagamaan bukan merupakan salah satu urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi bidang keagamaan.

Peningkatan kualitas religius aparatur diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan dokumen RPJMD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk hal tersebut, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, jika melihat indikator, badan kepegawaian hanya disuruh mendata dan memonitoring pelaksanaan kegiatan keagamaan, dan hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan tersebut jika dilihat dengan penggunaan anggaran sesuai dengan program RPJMD telah menghabiskan anggaran yang cukup besar (Rp 416,440,000), namun realisasi yang dihasilkan tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, maka untuk itu perlu dilakukan evaluasi pencapaian sasaran maupun evaluasi penggunaan anggaran agar dapat berhasil dengan baik.

- b. Terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak ada data capaian realisasinya, salah satu faktor penyebabnya adalah:
 - 1) perangkat daerah yang mengampu tanggung jawab tersebut tidak mencantumkan target RPJMD ke dalam renstra perangkat daerahnya sehingga ketika melaporkan capaian kinerja melalui LKIP tidak mencantumkan data realisasi.
 - 2) Terdapat indikator sasaran yang tidak bisa dihitung oleh perangkat daerah karena hal tersebut memerlukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di kota cirebon.
- c. Masih adanya perangkat daerah yang terlambat mengirimkan LKIP perangkat daerahnya sehingga tim penyusun LKIP Kota mengalami kesulitan perhitungan pencapaian sasaran.

Tabel 3. 3Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Misi Ke-1: Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota cirebon yang religius												
1.1.1	Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	100%	45%	100%	14%	75%	28%	75%	20%	75%	0%
1.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan	90%	n/a	90%	49%	85%	58,33%	80%	90%	75%	89,86%
1.2.2	Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi	6 besar tingkat Provinsi	n/a	Peringkat 7 tingkat provinsi	Peringkat 14 tingkat provinsi	Peringkat 7 tingkat provinsi	Peringkat 19	Peringkat 7 tingkat provinsi	10	Peringkat 9 tingkat provinsi	9 besar



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
						nsi	nsi		nsi			
1.2.3	Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama	0%	0%	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
Misi ke-2: Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN												
2.1.1	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	100%	72%	100%	100%	75%	74%	75%	99%	75%	63%
		Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	3 kasus / 1000 PNS	4 kasus / 1000 PNS	3 kasus / 1000 PNS	3 kasus / 1000 PNS	4 kasus / 1000 PNS	4 kasus / 1000 PNS	5 kasus / 1000 PNS	4 kasus / 1000 PNS	6 kasus / 1000 PNS	6 kasus / 1000 PNS



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Terpenuhinya tenaga fungsional PNS 100%	Dihapus	dihapus	Dihapus	dihapus	Dihapus	dihapus	100%	100%	100%	100%
2.1.2	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
		Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100%	100%	98,90%	100%	96,19%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.3	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	14/70	n/a	14 / 70	24 / 70	14/70	42/70	14/70	9/70	14/70	16/70
		Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip	1060 arsip digital	n/a	110 berkas	128 berkas	110 berkas	114 berkas	100 berkas	136 berkas	100 berkas	99 berkas
2.1.4	Terwujudnya pelayanan prima	Indeks kepuasan masyarakat dalam	90 poin	78,87	87 poin	73,97	85	71,4	80	74,51	75	77,79



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dalam perijinan	pelayanan perijinan 95%		poin		poin	poin	poin	poin	poin	poin	poin
		Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon	400 M (PMA) 600 M(PMDN)	1.733 M (PMA) 1.620 M (PMDN)	PMA 360 M PMDN 555 M	PMDN (1,757 T)	PMA (325 M) PMDN (510 M)	PMDN (1.357.254.219)	PMA (280 M) PMDN (475 M)	PMA (na) PMDN (1.321.066.815.350)	PMA (250 M) PMDN (425 M)	PMA (250 M) PMDN (425 M)
2.1.5	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	90 poin	n/a	85 poin	80,62 poin	85 poin	71,4 poin	80 poin	79,83 poin	80 poin	79,8 poin
	Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif	Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	80%	80%	79%	79%	78%	100%	Baru	Baru	Baru	baru



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2.2.1	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tata laksana SKPD	jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018.	Dihapus	Dihapus	Dihapus	dihapus	Dihapus	Dihapus	5%	5%	5%	5%
2.3.1	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebesar 95%	80 poin	80 poin	79 poin		78 poin	n/a	80 poin	na	80 poin	80 poin
2.3.2	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan kabupaten Cirebon	Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100%	25 titik	n/a	7 titik	0 titik	0 titik	0 titik	0 titik	0 titik	0 titik	0 titik
2.4.1	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota	Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100%	100% (1 peraturan e-government)	100% (4 peraturan e-government)	96% (1 peraturan e-government)	4 peraturan	92% (1 peraturan e-gove	n/a	88% (1 peraturan e-gove	0	84% (1 peraturan e-government)	84% (1 peraturan e-government)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi						rnment)		rnment)			
		Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	50 sistem yang terbangun	22 sistem yang terbangun	46 sistem yang terbangun	18 sistem yang terbangun	42 sistem yang terbangun	28 sistem yang terbangun	38 sistem yang terbangun	38 sistem yang terbangun	34 sistem yang terbangun	n/a
Misi ke-3: Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum												
3.1.1	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
3.2.1	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	15%	n/a	18%	n/a	20%	n/a	22%	Na	24%	n/a



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	10 titik	20 titik	20 titik	25 titik	30 titik	n/a	40 titik	Na	45 titik	35 titik
3.3.1	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 perda yang ditegakkan					dihapus	dihapus	9 kasus	17 kasus	10 kasus	9 kasus
3.4.1	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	50%	50%	40%		30%	n/a	20%	Na	10%	10%
3.5.1	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan	6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan	6 titik rawan kemacetan dan 2 titik rawan kecelakaan	7 titik rawan kemacetan dan 3 titik rawan kecelakaan	7 titik rawan kemacetan dan 3 titik rawan kecelakaan	8 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan	8 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan	9 titik rawan kemacetan dan 4 titik rawan kecelakaan	8 titik	10 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan	10 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
						n	n	n kece- laka- an	akaa n			
3.6.1	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL seluruhnya	40%	45,86%	46%	48,37	52%	33,91%	50%	70%	60%	50%
3.7.1	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari		Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
						darurat bencana 7 hari	tanggapan darurat bencana 7 hari	tanggapan darurat bencana 7 hari	tanggapan darurat bencana 7 hari		na 7 hari	
Misi ke-4: Meningkatkan kualitas sumber daya kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat												
4.1.1	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun	18 tahun	13,08 tahun	17 tahun	13,07 tahun	16 tahun	Data BPS	13 tahun di tahun 2011	12,94	13 tahun di tahun 2011	12,93
		Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	13 tahun	9,88	12,5 tahun	9,87 tahun	12 tahun	Data BPS	11,5 tahun 2011	9,76	11 tahun 2011	9,55



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4.2.1	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup 71,1	Dihapus	dihapus	Dihapus	dihapus	Dihapus	dihapus	70,13 tahun 2011	71,79 tahun	69,8 tahun 2011	71,77 tahun
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	BOR (%)	80,6	57,09	79,81%	86,76 %	81,44	70,66	Baru	Baru	Baru	baru
		LOS (hari)	4,48	4,20	4,39 hari	4,39 hari	4,35	4,42	Baru	Baru	Baru	baru
		TOI (hari)	1,27	3,11	1,2 hari	2,19 hari	1,16	1,82	Baru	Baru	Baru	baru
		BTO (hari)	43,35	12,68	41,29 kali	13,18 kali	39,32	58,89	Baru	Baru	Baru	baru
		NDR (kematian 48 jam/1000)	22,56 ‰	43,04	22,56‰	51,00 ‰	23,75 ‰	52	Baru	Baru	Baru	baru
		GDR (kematian kasar/1000)	44,28 ‰	75	54,67‰	70,00 ‰	54,67 ‰	70	Baru	Baru	Baru	baru



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Survei kepuasan pasien/pelanggan	85%	81,43	85%	81,43 %	80%	-	Baru	Baru	Baru	baru
		KK ber-PHBS (%)	75%	75,22	70%	66,80 %	65%	64,97 %	Baru	Baru	Baru	baru
		Angka kematian ibu	3 orang	3	3 orang	4 orang	3 orang	1 orang	Baru	Baru	Baru	baru
		Gizi buruk	<1%	0,17	<1%	0,18	<1%	0,18	Baru	Baru	Baru	baru
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Baru	Baru	Baru	baru
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%)	77,50%	100	77	81,43	76,5	79,22	Baru	Baru	Baru	baru
4.2.2 .	Terkendalinya laju pertumbuhan	Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun	75%	63,11	72%	103,10	69%	81,60	66%	81,45 %	63%	89%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	penduduk	2018 dari jumlah PUS.										
4.3.1	Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi	Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018	10 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi					11 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi	11 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi
4.4.1	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	50%	40,15%	45%	40,15%	40%	40%	35%	33,09%	30%	31,03%
		Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)	80%	73%	78 jenis	73 jenis	76 jenis	76 jenis	74 jenis	74 jenis	72 jenis	72 jenis
4.5.1	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli masyarakat	65	n/a	64,47	Data dari BPS						



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	444.959 orang	1.808.544 orang	427.367 orang	899.097 orang	409.367 orang	831.152 orang	391.567	686.121	373.736 orang	596.046 orang
4.6.1	Menurunnya jumlah KK miskin	Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota	25%	n/a	26,04%		27,09 %	Data dari BPS	28,14%	Data belum ada	29,19 %	n/a
4.7.1	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus	53 kasus	65 kasus	56 kasus	53 kasus	59	n/a	26 kasus	60 kasus	28 kasus	56 kasus
4.8.1	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penurunan PMKS 5% di tahun 2018	Dirubah	dirubah	Dirubah	dirubah	Dirubah	dirubah	29.919 orang	102.702 orang	30.407 orang	84.443 orang
	Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan	Jumlah peningkatan penanganan PMKS 5% pada tahun 2018	5% (3.685 orang)	n/a	1% (737 orang)	813 orang	1% (737 orang)	123 orang				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	sosial (PMKS)											
4.9.1	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender diatas 30% perempuan	40%	3%	38%	30%	36%	0	34%	0%	32%	n/a
Misi ke-5: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan												
5.1.1	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang kecamatan	Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak 5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	5%	n/a	4,2%		3,6%	n/a	2,9 %	0,34 %	2,20%	n/a
5.1.2	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW	Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	10%	10%	8,6%	10%	7,2%	n/a	5%	7,2%	4%	n/a



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Misi ke-6: Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup												
6.1.1 .	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat	Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018	9,81%	1,9%	9,64%		9,48 %	n/a	9,88 %	10,00 08%	9,84%	n/a
		Jumlah taman publik yang ditata 80% pada akhir tahun					Dihapus	dihapus	68%	Na	64%	n/a
6.1.2 .	Meningkatnya luasan cakupan pelayanan permakaman	Luas wilayah permakaman bertambah 2 Ha	Dihapus	dihapus	Dihapus	dihapus	Dihapus	dihapus	0,4 Ha	Na	0,4 Ha	n/a
6.1.3 .	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan: udara 15 lokasi, air sungai 22 lokasi, air laut 7 lokasi							Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan	Tercapainya pengendalian kualitas lingkungan udara 10 lokasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
									n udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi	udara 5 lokasi, air sungai 7 lokasi, air laut 3 titik	udara 10 lokasi, air sungai 15 lokasi	air sungai 15 lokasi
		Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)	90%	69,6	88%	84,6 %	86,5 0%	79,5				
		Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi SDA (rata-rata outcome)	100%	79,6%	80%	80%	60%	60%				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)	80%	69,6	69,60%	69,60 %	59,2 %	58,2 %				
		Prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap baku mutu lingkungan % (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%)	78%	77,5%	74,40%	74,40 %	76,50%	76,36%				
6.1.4	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	80%	80%	78%	78%	76%	n/a	74%	73%	72%	n/a

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Rasio pengelolaan sampah berbasis RW zero waste 20%	100%	n/a	99,38%	95,33 %	Dihapus	dihapus	5%	5%	1%	n/a
6.2.1	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	100%	100%	98%	99,39 %	98,74%	89,44%	98,10%	80%	96,80 %	90%
		Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	100%	100%	98%	90,41 %	96%	92,52%	94%	91,83 %	92%	98%
6.2.2	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik	10 titik	8 titik	12 titik	12 titik	14 titik	2 titik	16 titik	2 titik	17 titik	17 titik
6.2.3	Tersedianya sistem pengelolaan	Cakupan pelayanan air limbah domestik	100%	100%	98%	99,39 %	96%	100 %	94%	100%	92%	92%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	jaringan air limbah domestik secara optimal	Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga)	76,45%	90,32%	74,16%	74,16 %	71,87 %	87,73	69,58 %	89,32 %	67,29 %	n/a
6.2.4	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80%	80%	75,89	78%		76%	0	74%	93,47 %	72%	n/a
6.3.1	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus.	0 kasus	0 kasus	7 kasus	10 kasus	14 kasus	10 kasus	10	10	10 Kasus	10 Kasus
6.4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 20%.	20 %	24,4%	52,59 Ha (1,38%)	27,472 Ha	70,09 Ha (1,84 %)	59,6 Ha	26%	3,22 %	28%	28%
6.4.2	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah.	16,256 rumah	846 rumah yang diperbaiki	16.696 rumah	16.696 rumah	17.576 rumah	15.565 rumah	15.056 rumah	2000 rumah	16.756 rumah	n/a
6.4.3	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan	90%	100%	88%	90%	86%	80%	84%	84%	82%	60%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2018		Tahun 2017		Tahun 2016		TAHUN 2015		TAHUN 2014	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	umum										

3.3. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Sebagai upaya pencapaian target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018, Pemerintah telah mengalokasi anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2018. Penggunaan anggaran belanja daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kinerja tahun Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018, rincian penggunaan APBD Kota Cirebon Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Tabel 3. 4Tabel Penggunaan Anggaran dan Program

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1.1.1	Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD 100%	100%	45%	45%	program peningkatan kualitas religius aparatur	429,035,250	416,440,000	97.06
1.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bandang dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan	90%	n/a		program peningkatan kualitas sarana peribadatan	39,907,500	39,907,500	100
1.2.2	Terwujudnya prestasi kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 6 besar tingkat provinsi	6 besar tingkat provinsi	n/a		program peningkatan kompetensi keagamaan	2,038,544,400	1,981,069,563	97.18
1.2.3	Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran	Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama	0%	0%		program kerukunan umat beragama	540,312,500	520,306,500	96.30



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
	agamanya masing-masing								
2.1.1	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	100%	72%		program pendidikan kedinasan	2,318,328,500	2,285,443,900	98.58
		Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun	3 kasus / 1000 PNS	4 kasus / 1000 PNS		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4,612,369,975	4,403,381,490	95.47
2.1.2	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di 2018	WTP	WTP		program optimalisasi pengelolaan aset daerah	1,072,839,000	990,050,140	92.28
2.1.3	Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD	Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100%	100%	98,90		program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	380,578,000	369,085,330	96.98



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	760,361,000	664,379,519	87.38
						Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	356,325,000	295,345,000	82.89
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,371,722,800	1,095,749,100	79.88
						Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Program Pengembangan Data/Informasi	236,245,000	218,035,000	92.29



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan	-	-	
2.1.4	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	14/70			program perbaikan sistem administrasi kearsipan	125,946,000	125,646,000	99.76
		Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip	1060 arsip digital			Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	13,463,000	13,463,000	100.00
2.1.5	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan 95%	90 poin	78,87 poin		program penataan dan pelayanan perijinan	549,331,000	517,087,400	94.13
2.1.6	Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi	Meningkatnya nilai investasi di kota Cirebon	400 M (PMA) 600 M (PMDN)	1.733 M (PMA) 1.620 M (PMDN)		program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	174,762,500	156,451,150	89.52
			PMDN (510 M)			program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	43,389,500	26,606,500	61.32



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
2.1.7	Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	90 poin			program pendaftaran penduduk	968,047,400	954,820,779	98.63
						program pelayanan pencatatan sipil	64,953,800	64,953,800	100.00
						program sistem informasi administrasi kependudukan	183,428,000	176,201,200	96.06
						program perencanaan kebijakan kependudukan			
2.2.2	Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang representatif	Jumlah bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi baik	80%	80%					
2.3.1	Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan	80 poin	80 poin					
2.3.3	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan	Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU) disepakati	25 titik	n/a		program pembinaan pemerintahan	46,175,000	5,442,000	11.79



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
	kabupaten cirebon	100%							
2.4.1	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya peraturan tentang E-Government 100%	100% (1 peraturan e-governm ent)	100% (4 peraturan 3-governme nt)		program peningkatan infrastruktur teknologi informasi	1,694,860,000	1,665,118,239	98.25
		Terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	50 sistem yang terbangun	22 sistem yang terbangun					
3.1.1	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas ras dan agama 0 kasus	0 kasus	0 kasus		program pengembangan wawasan kebangsaan	51,930,250	47,942,800	92.32
3.2.1	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	Menurunnya rasio angka kriminalitas dibanding jumlah penduduk	15%	n/a		program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	554,891,000	539,229,500	97.18



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
		Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	10 titik	20 titik		program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1,517,092,012	1,452,579,543	95.75
						program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	482,736,000	452,700,700	93.78
						program pembinaan pemuda di daerah rawan ketertiban umum			
						program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	126,323,000	125,766,000	99.56
3.4.1	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50%	50%	50%					
3.5.1	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan	6 titik rawan kemaceta	6 titik rawan kemaceta		program pengendalian dan	2,635,800,000	2,600,505,853	98.66



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
		kecelakaan	n dan 2 titik rawan kecelakaan	n dan 2 titik rawan kecelakaan		pengamanan lalu lintas			
						program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	100,000,000	98,900,000	98.90
						program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran			
						program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	-	-	-
						program peningkatan pelayanan parkir	225,000,000	222,729,250	98.99
3.6.1	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan/ dibagi jumlah PKL	40%	45,86%		program penataan pedagang kali lima			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
		seluruhnya							
3.7.1	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian dan waktu tanggap darurat bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana 10 menit dan waktu tanggap darurat bencana 7 hari		program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4,612,369,975	4,403,381,490	95.47
						program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	3,521,008,000	3,518,978,000	99.94
						program penanggulangan korban bencana	28,330,000	27,675,000	97.69



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
4.1.1	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	Meningkatnya lama harapan sekolah pada usia maksimal 18 tahun	18 tahun	13,08 tahun		program manajemen pelayanan pendidikan	1,561,408,000	1,532,974,600	98.18
		Rata-rata lama sekolah (13 tahun)	13 tahun	9,88		program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	38,046,676,500	37,607,884,569	98.85
						program pendidikan menengah			
						program pelayanan pendidikan SMK			
						program pendidikan non formal	1,051,429,000	1,046,783,945	99.56
						program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	700,000,000	669,004,950	95.57
						program pendidikan anak usia dini (PAUD)	1,658,571,000	1,652,807,000	99.65



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	559,961,000	537,177,300	95.93
4.2.1.	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	BOR (%)	80,6	57,09		program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	315,913,000	294,412,800	93.19
		LOS (hari)	4,48	4,20		program perbaikan gizi masyarakat	1,780,204,200	1,778,204,200	99.89
		TOI (hari)	1,27	3,11		program upaya kesehatan masyarakat	51,026,861,575	49,846,555,107	97.69
		BTO (kali)	43,35	12,68		program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	873,430,700	872,160,700	99.85
		NDR (kematian 48 jam/1000)	22,56 ‰	43,04		program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1,720,026,850	846,997,600	49.24
		GDR (kematian kasar/1000)	44,28 ‰	75		program pelayanan kesehatan penduduk	2,384,636,100	2,375,623,338	99.62



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						miskin			
		Survei kepuasan pasien/pelanggan	85%	81,43		program pelayanan kesehatan lanjutan	280,216,879,245	238,280,703,110	85.03
		KK ber-PHBS (%)	75%	75,22		program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	21,174,271,000	20,691,408,590	97.72
		Angka kematian ibu	3 orang	3		program peningkatan mutu RSUD gunung jati sebagai rumah sakit pendidikan			
		Gizi buruk	50 bayi	17					
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar	< 1%	0,17					



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (%)	100%	100					
4.2.2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya peserta KB aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS	75%	63,11		program keluarga berencana	2,816,743,500	2,766,864,500	98.23
4.3.1.	Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat provinsi	Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun 2018	10 besar tingkat provinsi	10 besar tingkat provinsi		program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	1,546,019,000	1,538,013,200	99.48
						program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	269,839,000	217,269,000	80.52
4.4.1.	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	50%	40,15%		program pengelolaan keragaman budaya	446,755,000	445,555,000	99.73
						program pengelolaan kekayaan budaya	464,224,000	462,374,000	99.60
		Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 jenis (72 bangunan	80%	73%		program pengembangan kerjasama pengelolaan	144,427,500	143,922,500	99.65



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
		cagar budaya di tahun 2012)				kekayaan budaya			
4.5.1.	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli masyarakat	65	n/a		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	76,130,000	74,603,000	97.99
		Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	444.959 orang	1.808.544 orang		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	179,587,000	136,318,000	75.91
						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	254,867,500	238,783,500	93.69
						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	201,067,500	200,503,500	99.72



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						Program peningkatan kesempatan kerja	-	-	-
						Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	155,000,000	155,000,000	100.00
						Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	716,444,000	712,639,084	99.47
						Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	429,072,500	424,347,000	98.90



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, peternakan dan perikanan	290,000,000	287,126,945	99.01
						Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	373,450,000	368,467,000	98.67
						Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	957.580.000	967,136,920	947,357,200
						Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	116,044,000	112,788,000	97.19
						Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	524,197,900	520,233,250	99.24



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						Program pengembangan destinasi pariwisata	-	-	-
4.6.1.	Menurunnya jumlah KK miskin	Rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota	25%	n/a		Program satu data keluarga miskin			
						Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	167,600,000	8,940,000	5.33
						Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin	-	-	-
						Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2,384,636,100	2,375,623,338	99.62
						Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi keluarga miskin	-	-	-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						Program penataan kawasan perumahan masyarakat miskin	-	-	-
						Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin	-	-	-
						Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin	-	-	pelaksanaan 2 tahun kebelakang di evaluasi terlebih dahulu di tahun 2016, sehingga anggaran tidak diberikan.
4.7.1.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunnya kasus	53 kasus	65 kasus		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	63,842,000	62,630,000	98.10
						Program RW layak anak	-	-	-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
4.8.1.	Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah peningkatan penanganan PMKS 5% pada tahun 2018	5% (3.685 orang)	n/a		Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	-	-	-
						Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	105,962,000	100,387,000	94.74
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	491,090,000	486,028,000	98.97
4.9.1.	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender di atas 30% perempuan	40%	3%		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	22,691,200	21,221,200	93.52
5.1.1.	Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang berasal dari musrenbang	Persentase kenaikan nilai musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam APBD sebanyak	5%	n/a		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1,007,995,000	974,929,700	96.72



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
	kecamatan	5% sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)							
5.1.2.	Meningkatnya nilai swadaya masyarakat dalam stimulan/ bantuan RW	Prosentase swadaya masyarakat sebesar 10% terhadap jumlah bantuan RW	10%	10%		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	608,847,000	602,787,610	99.00
6.1.1.	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal	Luas ruang terbuka hijau publik menuju 10% pada akhir tahun 2018	9,81%	1,9%		Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau	-	-	-
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	125,010,000	125,010,000	100.00
						Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum			
6.1.2.	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)	90%	69,6		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	787,025,650	715,376,050	90.90



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						Hidup			
		Air sungai (lokasi) meningkatnya pelayanan konservasi SDA (rata-rata outcome)	100%	79,6		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	210,447,500	208,259,400	98.96
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)	80%	69,6		Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	75,500,000	74,153,000	98.22
6.1.3.	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	80%	80		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2,389,916,000	2,346,933,500	98.20
6.2.1.	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	100%	100%		Program Pembangunan Jalan dan			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
	mendukung akselerasi pergerakan masyarakat					Jembatan			
		Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	100%	100%		Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan			
6.2.2.	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir 18 titik menjadi 10 titik	10 titik	8 titik		Program pembangunan saluran drainase primer dan sekunder			
						Program Rehabilitasi/Peeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder			
						Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
						Program Pengendalian Banjir			
6.2.3.	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik	100%	100%					
		Jumlah jamban dan septitank 76,45% (65.766 rumah tangga)	76,45%	90,32%					
6.2.4.	Tersedianya sistem pengelolaan air minum	Cakupan pelayanan air minum sebanyak 80%	80%	75,89					
6.3.1.	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	0 kasus	0 kasus		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
						Program penyediaan sistem informasi pengendalian tata ruang	-	-	-
6.4.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh menjadi 0,46%	20 %	24,4%		Program Lingkungan Sehat Perumahan			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Kinerja		Program	Anggaran		
				Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
6.4.2.	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	16.256 rumah	846 rumah yang diperbaiki		Program Pengembangan Perumahan			
6.4.3.	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	90%	100%		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
						Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	99,950,000	99,070,000	99.12



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Kondisi umum belanja daerah Kota Cirebon Tahun 2018 berdasarkan laporan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Rincian penggunaan APBD kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Pos Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 440.432.183.834,-
2. Dana Perimbangan Rp 814.145.269.518,-
3. Lain-Lain pendapatan yang sah Rp 168.396.364.498,-

Pos Belanja

1. Belanja Tidak Langsung Rp 674.059.990.646,-
2. Belanja Langsung Rp 751.994.586.537,-

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,020,536,390	69,965,953,834
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37,565,756,363	35,403,440,305
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3,377,443,200	3,000,916,500
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,612,369,975	4,403,381,490
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,656,517,200	6,321,634,830
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,658,571,000	1,652,807,000
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	38,046,676,500	37,607,884,569
8	Program Pendidikan Non Formal	1,051,429,000	1,046,783,945
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	700,000,000	669,004,950



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,561,408,000	1,532,974,600
11	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN	39,422,822,013	37,903,061,748
12	Non Program	-	648,307,721
13	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	2,195,800,000	2,191,554,647
14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	51,026,861,575	49,846,555,107
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	315,913,000	294,412,800
16	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,780,204,200	1,778,204,200
17	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	940,291,275	917,558,658
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	873,430,700	872,160,700
19	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	10,131,084,500	9,575,242,610
20	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	35,000,000	35,000,000
21	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	40,147,200	37,857,200
22	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	1,720,026,850	846,997,600
23	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	464,888,500	456,083,500
24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2,384,636,100	2,375,623,338
25	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	189,363,400	189,363,400
26	Program Pengamatan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan	381,232,000	381,232,000
27	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	280,216,879,245	238,280,703,110
28	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	21,174,271,000	20,691,408,590
29	Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan	3,690,855,000	3,619,166,389



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
30	Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan	6,845,064,193	6,139,995,165
31	Program Penyelenggaraan Jalan	95,855,714,000	37,580,384,705
32	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	10,506,508,105	10,450,642,400
33	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	100,000,000	99,225,000
34	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	22,303,433,000	22,056,973,300
35	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	38,568,823,314	38,458,102,550
36	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	296,291,000	243,541,000
37	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	183,926,000	182,291,000
38	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	522,025,000	518,569,000
39	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	21,050,880,500	20,858,698,700
40	Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum	6,698,835,604	34,231,600
41	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Umum Perumahan	517,000,000	513,662,000
42	Program Penyediaan Perumahan	315,000,000	197,512,500
43	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	620,000,000	598,477,500
44	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	56,990,000	45,990,000
45	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	125,010,000	125,010,000
46	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	482,736,000	452,700,700
47	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1,517,092,012	1,452,579,543
48	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	554,891,000	539,229,500
49	Program Dukungan Kelancaran	946,784,900	890,856,942



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan Pemilihan Umum		
50	Program Penegakan Peraturan Daerah	294,745,000	270,137,100
51	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3,521,008,000	3,518,978,000
52	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	107,889,000	107,419,000
53	Program Penanggulangan Bencana	735,080,000	729,202,000
54	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	47,597,500	47,554,000
55	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	51,930,250	47,942,800
56	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	27,073,000	27,004,000
57	Program Pendidikan Politik Masyarakat	418,210,000	406,985,300
58	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	491,090,000	486,028,000
59	Program Penguatan Jejaring Kemitraan Dalam Rangka Penanganan PMKS	105,962,000	100,387,000
60	Program Penanggulangan Korban Bencana	28,330,000	27,675,000
61	Program Satu Data Keluarga Miskin	-	-
62	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	201,067,500	200,503,500
63	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	155,000,000	155,000,000
64	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	254,727,400	252,279,900
65	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	63,842,000	62,630,000
66	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	22,691,200	21,221,200
67	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	397,848,750	392,540,000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
68	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	716,444,000	712,639,084
69	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	429,072,500	424,347,000
70	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2,389,916,000	2,346,933,500
71	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	787,025,650	715,376,050
72	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	435,236,000	432,051,000
73	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	210,447,500	208,259,400
74	Peningkatan Pengendalian Polusi	74,615,000	74,615,000
75	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut	46,156,000	45,820,000
76	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	75,500,000	74,153,000
77	Program Pendaftaran Penduduk	968,047,400	954,820,779
78	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	64,953,800	64,953,800
79	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	183,428,000	176,201,200
80	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1,007,995,000	974,929,700
81	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	608,847,000	602,787,610
82	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan	425,663,100	412,430,200
83	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	7,753,066,700	7,595,943,932
84	Program RW Bersih	846,124,400	802,499,100
85	Program Pengendalian Penduduk	156,100,000	154,593,000
86	Program Keluarga Berencana	2,816,743,500	2,766,864,500
87	Program Penyuluhan dan Penggerakan	908,900,000	906,482,030
88	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	247,320,000	247,320,000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
89	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	99,950,000	99,070,000
90	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,000,000	98,900,000
91	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	611,500,000	602,584,000
92	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,635,800,000	2,600,505,853
93	Program Peningkatan Pelayanan UPTD	624,158,000	619,753,500
94	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	225,000,000	222,729,250
95	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
96	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	212,510,000	184,338,000
97	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	257,485,000	255,197,550
98	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	725,999,900	719,526,603
99	Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi	154,130,000	152,698,430
100	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi	374,475,000	355,596,000
101	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	1,090,000,000	1,088,410,000
102	Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	1,694,860,000	1,665,118,239
103	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	3,115,224,000	2,825,115,850
104	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	179,587,000	136,318,000
105	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	76,130,000	74,603,000
106	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	254,867,500	238,783,500
107	Program Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis RW Untuk Keluarga Miskin	420,055,000	268,438,250



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
108	Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	248,531,000	223,460,000
109	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	174,762,500	156,451,150
110	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	43,389,500	26,606,500
111	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	549,331,000	517,087,400
112	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	680,000,000	676,748,300
113	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	126,323,000	125,766,000
114	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1,546,019,000	1,538,013,200
115	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	269,839,000	217,269,000
116	Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah	100,000,000	100,000,000
117	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	208,366,000	207,428,000
118	Program Persandian Komunikasi dan Informasi	147,500,000	133,750,000
119	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	464,224,000	462,374,000
120	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	446,755,000	445,555,000
121	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	144,427,500	143,922,500
122	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	559,961,000	537,177,300
123	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	125,946,000	125,646,000
124	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	181,586,000	178,986,000
125	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	13,463,000	13,463,000
126	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	62,600,000	61,800,000
127	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	116,044,000	112,788,000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
128	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	524,197,900	520,233,250
129	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	464,660,000	454,707,700
130	Program Pengembangan Kemitraan	684,140,000	672,498,000
131	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	290,000,000	287,126,945
132	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	373,450,000	368,467,000
133	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	967,136,920	947,357,200
134	Program Pencegahan Penyakit Hewan	202,000,000	198,259,300
135	Program Metrologi Legal	149,297,000	110,353,632
136	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	179,520,000	177,632,425
137	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	106,232,000	104,766,500
138	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Standarisasi dan Pengawasan Kemetrolgian	31,900,000	13,040,000
139	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	170,494,900	169,806,000
140	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	55,646,000	55,646,000
141	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	209,931,100	194,291,000
142	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2,027,622,000	1,943,009,550
143	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	380,578,000	369,085,330
144	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	760,361,000	664,379,519
145	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	430,898,500	381,558,950
146	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	444,272,000	351,097,000
147	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,618,390,750	2,292,767,895



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
148	Program Penataan Kelembagaan	207,616,000	206,560,000
149	Program Pembinaan Pemerintahan	46,175,000	5,442,000
150	Program Pembinaan Administrasi Umum	84,956,000	79,789,000
151	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	429,829,000	340,829,500
152	Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	996,735,000	904,747,822
153	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	429,035,250	416,440,000
154	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	39,907,500	39,907,500
155	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	2,038,544,400	1,981,069,563
156	Program Kerukunan Umat Beragama	540,312,500	520,306,500
157	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	6,285,142,000	4,854,441,409
158	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	371,952,500	350,427,500
159	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	356,325,000	295,345,000
160	Program Pengembangan Data/Informasi	236,245,000	218,035,000
161	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,371,722,800	1,095,749,100
162	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	113,210,000	112,550,000
163	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	167,600,000	8,940,000
164	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	257,206,000	217,996,000
165	Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	1,072,839,000	990,050,140
166	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,630,052,300	3,522,792,227



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi
167	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD	1,947,800,000	1,440,357,624
168	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD	680,877,000	514,506,800
169	Program Peningkatan Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	630,076,000	589,463,000
170	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	302,650,000	302,095,000
171	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	142,000,000	132,355,250
172	Program Pendidikan Kedinasan	2,318,328,500	2,285,443,900
173	Program Penelitian dan Pengembangan	584,347,000	549,431,000
Total		876,790,122,684	751,994,586,537

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat realisasi anggaran terhadap pencapaian visi dan misi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Dalam pelaksanaan program tersebut, penggunaan anggaran tampaknya belum memperhatikan skala prioritas kebutuhan, sehingga jika ditelaah lebih dalam terlihat bahwa penggunaan program yang bukan prioritas menggunakan anggaran yang lebih besar dibandingkan program yang memang menyangkut kebutuhan masyarakat kota Cirebon.

Penggunaan anggaran program yang bersifat rutin (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur) masih mendominasi sebagian besar penggunaan anggaran (Rp 112,773,692,129,-) atau sekitar 14,99% terhadap realisasi belanja daerah Kota Cirebon. Jika ditelaah lebih dalam terlihat bahwa keberadaan program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kota Cirebon, namun menggunakan anggaran yang cukup besar,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

contohnya adalah Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang kegiatannya hanya berupa pengadaan pakaian dinas saja namun menghabiskan anggaran sampai dengan Rp 3,000,916,500,- atau sekitar 0,39% terhadap belanja daerah, namun jika dibandingkan dengan program yang langsung berdampak terhadap pencapaian visi dan misi contohnya Program Pendidikan Non Formal yang hanya menyerap anggaran sebesar Rp 1,046,783,945,- atau sekitar 0,13% terhadap belanja daerah.

Penentuan skala prioritas merupakan salah satu bentuk penggunaan efisiensi anggaran daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon ke depannya harus memperhatikan indikator sasaran dan sumber daya anggaran yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian RPJMD selama tahun anggaran 2018. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja pemerintah daerah kota Cirebon selama tahun 2018 menunjukkan beberapa keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD 2013-2018 dan telah memenuhi 44 sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator sasaran kinerja pemerintah daerah kota Cirebon juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah daerah kota Cirebon tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.572.686.574.342,- jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp 1.426.054.577.183,- atau 90,67%.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2018 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun secara eksternal, terhadap target capaian indikator sarana pemerintah daerah kota Cirebon. kekurangan yang terjadi selama tahun 2018 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah daerah Kota Cirebon tahun 2018 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas,

telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan Bab III terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon di masa mendatang, yaitu:

- a. Penetapan perencanaan yang smart (*spesific, measurable, achievable, and time bound*), sehingga indikator sasaran dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan baik.
- b. Penegasan perangkat daerah pengampu sasaran maupun indikator sasaran, dan meng"adop" sasaran maupun indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD ke dalam renstra perangkat daerah sehingga terdapat harmonisasi dan keselarasan pencapaian sasaran.
- c. Penggunaan skala prioritas terhadap penggunaan anggaran, sehingga indikator sasaran prioritas tinggi mendapatkan skala prioritas anggaran yang tinggi dibandingkan dengan indikator sasaran prioritas rendah.
- d. Menterjemahkan sasaran dan indikator sasaran menjadi target kinerja para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.